

KATA PENGANTAR

Pemetaan SP2010 merupakan rangkaian kegiatan persiapan Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Dalam kegiatan ini dilakukan pembentukan dan pemetaan wilayah kerja statistik.

Wilayah kerja statistik yang disebut Blok Sensus SP2010 (BS) dibentuk berdasarkan Satuan Lingkungan Setempat (SLS) terkecil. Pemetaan BS dilakukan dengan menggunakan peta dasar hasil olah citra satelit, hasil pemanfaatan Global Positioning System (GPS), atau menggunakan peta dasar lainnya yang bersumber dari institusi yang menghasilkan peta berkualitas agar diperoleh peta BS yang tepat posisi dan tepat bentuk sehingga tidak terjadi lewat cacah atau ganda cacah pada pelaksanaan SP2010

Buku ini secara garis besar memuat petunjuk untuk Pemeta Desa dalam melaksanakan Pemetaan SP2010 agar kegiatan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Jakarta, Oktober 2008
Kepala Badan Pusat Statistik,

DR. RUSMAN HERIAWAN
NIP. 340003999

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	v
Bab 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Tujuan	2
Bab 2. KONSEP DAN DEFINISI	3
2.1 Peta	3
2.2 Peta Dasar	3
2.3 Wilayah Administrasi	6
2.4 Satuan Lingkungan Setempat (SLS)	6
2.5 Blok Sensus SP2010 (BS)	8
2.6 Segmen	10
2.7 Rumah Tangga	11
2.8 Keluarga dan Kepala Keluarga (KK)	11
2.9 Bangunan Fisik	11
2.10 Bangunan Sensus	13
2.11 Batas Alam dan Buatan	14
2.12 Kriteria Muatan Blok Sensus Dominan	15
2.13 Apartemen dan Kelompok Bangunan Usaha	16
Bab 3. DASAR-DASAR PEMETAAN	17
3.1 Unsur-Unsur Peta	17
3.2 Penggambaran Peta	20
Bab 4. METODOLOGI	25
4.1 Cakupan Wilayah	25
4.2 Cakupan Kegiatan	25
4.3 Data yang Dikumpulkan	26
4.4 Jenis Dokumen yang Digunakan	26
4.5 Tahap-Tahap Kegiatan dalam Penggambaran Sketsa Peta Desa dan Blok Sensus	27
Bab 5. TATA CARA PENGISIAN DAFTAR REKAPITULASI DESA (SP2010-RD)	53
5.1 BLOK I. PENGENALAN TEMPAT	53
5.2 BLOK II. KETERANGAN PETUGAS	54
5.3 BLOK III. RINCIAN REKAP DESA	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Contoh peta dasar berupa <i>print out</i> citra satelit.....	4
Gambar 2.2.	Contoh peta dasar yang mempunyai koordinat bumi (Peta Rupabumi Bakosurtanal)	5
Gambar 2.3.	Contoh peta dasar yang tidak memiliki koordinat bumi (Sketsa Peta-WA BPS)	5
Gambar 2.4.	Contoh hirarki SLS	7
Gambar 2.5.	Satu BS terdiri dari satu SLS utuh	7
Gambar 2.6.	Satu BS merupakan bagian dari suatu SLS	7
Gambar 2.7.	Satu BS gabungan dari beberapa SLS utuh	7
Gambar 2.8.	Contoh sawah sebagai bagian dari BS Biasa (004B) dan sawah sebagai BS Persiapan (008P).....	10
Gambar 2.9.	Contoh Segmen	11
Gambar 2.10.	Bangunan tunggal tidak bertingkat.....	12
Gambar 2.11.	Bangunan tunggal bertingkat	12
Gambar 2.12.	Bangunan gandeng dua tidak bertingkat	12
Gambar 2.13.	Bangunan tunggal bertingkat banyak.....	12
Gambar 2.14.	Denah kompleks sekolah yang dianggap terdiri dari 1 bangunan fisik dan 2 bangunan sensus	14
Gambar 2.15.	Denah rumah di Bali yang dianggap 1 bangunan fisik dan 1 bangunan sensus	14
Gambar 3.1.	Arah mata angin	17
Gambar 3.2.	Skala grafis	18
Gambar 3.3.	Contoh ukuran area peta yang akan dijiplak	22
Gambar 3.4.	Contoh ruang kosong untuk memperbesar peta	22
Gambar 3.5.	Contoh perbesaran sketsa peta	23
Gambar 3.6.	Contoh sketsa peta desa dengan inset peta.....	24
Gambar 4.1.	Alur kerja petugas pemeta dan pengawas/pemeriksa yang menggunakan peta dasar citra atau peta yang memiliki koordinat bumi	28
Gambar 4.2.	Alur kerja petugas pemeta dan pengawas/pemeriksa yang menggunakan peta dasar citra atau peta yang tidak memiliki koordinat bumi	29
Gambar 4.3.	Contoh peta dasar suatu desa yang bersumber dari <i>print out</i> citra satelit	30
Gambar 4.4.	Contoh sketsa peta WA BPS rujukan	31
Gambar 4.5.	Contoh penggambaran batas SLS hasil kunjungan ke kantor desa pada <i>print out</i> citra satelit	32
Gambar 4.6.	Contoh salinan sketsa peta desa dalam kertas <i>doorslag</i>	34
Gambar 4.7.	Contoh sketsa peta WA sebagai peta dasar	35
Gambar 4.8.	Contoh salinan sketsa peta SLS hasil perbesaran 2 kali	36
Gambar 4.9.	Contoh salinan sketsa peta SLS yang muatannya banyak.....	38
Gambar 4.10.	Contoh Urutan Pembentukan BS.....	40
Gambar 4.11.	Contoh 2 BS dalam 1 lantai	41
Gambar 4.12.	Contoh apartemen dengan 1 BS di 2 lantai	42
Gambar 4.13.	Contoh sekelompok rumah susun yang dibentuk menjadi satu BS.....	43
Gambar 4.14.	Contoh apartemen dimana 1 BS digabung dengan bangunan lain	44
Gambar 4.15.	Contoh pembentukan blok sensus untuk pemukiman di atas air	45
Gambar 4.16.	Contoh penomoran blok sensus.....	46
Gambar 4.17.	Contoh penomoran segmen dalam suatu BS.....	48
Gambar 4.18.	Sketsa peta desa SP2010-WA	49
Gambar 4.19.	Contoh sketsa peta BS SP2010-WB	50
Gambar 5.1.	Contoh peta desa simulasi	58

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1.	Contoh pengisian kolom 1	55
Tabel 5.2.	Contoh pengisian kolom 4, 5 dan 6	56
Tabel 5.3.	Contoh pengisian kolom 9, 10, 14, 15, dan 16	57
Tabel 5.4.	Contoh pengisian kolom 11	58
Tabel 5.5.	Contoh pengisian kolom 13	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Contoh pengisian daftar SP2010-RD Blok I dan Blok II
Lampiran 2.	Contoh pengisian daftar SP2010-RD Blok III
Lampiran 3.	Alur kerja pemeta desa SP2010
Lampiran 4.	Daftar Singkatan dan Istilah

Kecamatan □□□□□□□□□□

TUGAS PEMETA DESA

- 1. Mengidentifikasi dan menggambarkan batas SLS pada peta dasar;*
- 2. Mencari informasi muatan (jumlah keluarga, bangunan sensus bukan tempat tinggal, dan bangunan sensus tempat tinggal kosong) per SLS. Jika muatan SLS besar, maka informasi muatan per segmen harus dibuat dan dicatat;*
- 3. Menggambarkan sketsa peta desa dan batas-batas SLS di dalamnya, serta mencantumkan muatan per SLS;*
- 4. Membentuk BS berdasarkan muatan SLS;*
- 5. Menggambarkan sketsa peta BS;*
- 6. Mengisi SP2010-RD.*

Bab

1

PENDAHULUAN

Setelah mempelajari Bab 1, petugas dapat memahami Sensus Penduduk sebagai sumber data kependudukan, dan pentingnya sketsa peta blok sensus (BS) dalam pencacahan Sensus Penduduk 2010.

1.1. Latar Belakang

Sensus Penduduk merupakan sumber data utama kependudukan yang mempunyai nilai strategis karena hasilnya akan dijadikan salah satu dasar perumusan perencanaan dan evaluasi semua bidang pembangunan. Sejak Indonesia merdeka, Sensus Penduduk telah dilaksanakan lima kali. Sensus Penduduk yang keenam akan dilaksanakan tahun 2010 (SP2010).

Untuk keperluan petugas lapangan SP2010, dibutuhkan wilayah kerja statistik yang disebut Blok Sensus (BS). Dengan berbekal peta BS, seorang petugas lapangan diharapkan mengetahui secara pasti wilayah kerjanya. Kepastian mengenai wilayah kerja ini sangat strategis untuk menghindari kesalahan cakupan yang merupakan salah satu ukuran utama keberhasilan suatu sensus. Kesalahan cakupan yang dimaksud dapat berupa lewat cacah (*omission*) atau ganda cacah (*double counting*).

Selain untuk keperluan pencacahan SP2010, BS akan digunakan untuk membangun Kerangka Induk yang juga sangat strategis karena akan dijadikan sebagai dasar perancangan dan pengambilan sampel survei-survei BPS selama kurun waktu 2010-2020.

Karena dua peranan penting dan strategis tersebut, maka BS perlu dibangun secara sungguh-sungguh dengan mengikuti aturan, tatacara dan kriteria yang baku dalam kegiatan Pemetaan Sensus Penduduk 2010 (Pemetaan SP2010). Kegiatan ini meliputi pembuatan sketsa peta desa (RW untuk DKI Jakarta), pembentukan BS, dan pembuatan sketsa peta BS.

Peta dasar yang digunakan dalam pembuatan sketsa peta desa dan BS sudah dipersiapkan pada tahun 2008. Peta dasar ini telah diusahakan sesuai kondisi terakhir dan memenuhi kriteria tepat posisi, tepat bentuk, serta memiliki koordinat bumi (*georeference*).

Buku ini dimaksudkan sebagai pedoman utama bagi petugas pemeta dalam membuat sketsa peta desa, membentuk BS, dan membuat sketsa peta BS yang benar sesuai aturan, tatacara, dan kriteria yang baku. Buku ini juga digunakan sebagai pedoman bagi petugas dalam mengisi daftar rekapitulasi desa (SP2010-RD).

Desa yang dimaksud dalam kegiatan Pemetaan SP2010 adalah desa, kelurahan, nagari, atau nama lain yang setara dengan desa.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Pemetaan SP2010 adalah:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
2. Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional.
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
4. Peraturan, keputusan, dan instruksi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sensus Penduduk 2010.

1.3. Tujuan

Tujuan kegiatan Pemetaan 2010 adalah untuk membuat sketsa peta desa, membentuk BS berdasarkan muatan SLS (jumlah kepala keluarga, bangunan sensus bukan tempat tinggal, dan bangunan sensus tempat tinggal kosong), serta membuat sketsa peta BS. Selain itu, untuk mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan BS dan SLS.

Bab

2

KONSEP DAN DEFINISI

Setelah mempelajari Bab 2, petugas pemeta akan memahami beberapa konsep dasar yang terkait dengan penggambaran sketsa peta, pembentukan blok sensus, dan pengisian daftar SP2010-RD.

2.1. Peta

Peta adalah suatu bentuk/gambar sebagian permukaan bumi pada suatu bidang datar yang memberikan informasi tentang keadaan suatu wilayah.

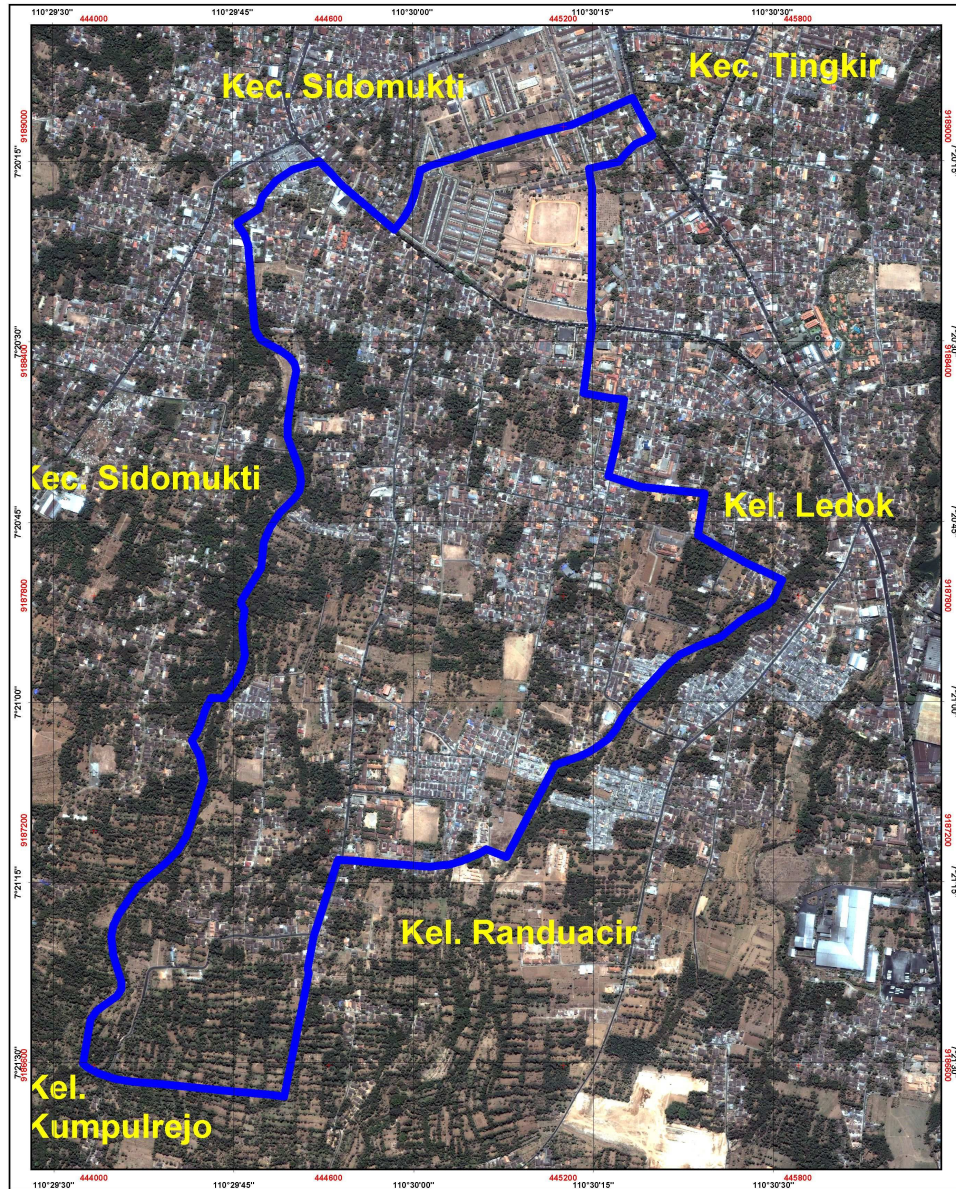
2.2. Peta Dasar


Peta dasar dalam kegiatan Pemetaan SP2010 adalah peta yang dijadikan sebagai acuan dalam penggambaran sketsa peta desa dan BS. Peta dasar diusahakan mengacu pada konsep data spasial menurut Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa "data spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan dan pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinat nasional".

Peta dasar dalam kegiatan Pemetaan SP2010 dapat berupa *print out* citra satelit seperti yang terlihat pada Gambar 2.1, atau peta yang memiliki koordinat bumi, misalnya peta rupabumi dari Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) seperti pada Gambar 2.2. Jika peta-peta tersebut tidak tersedia, maka peta yang tidak memiliki koordinat bumi seperti sketsa peta WA BPS (Gambar 2.3) dapat dijadikan peta dasar.

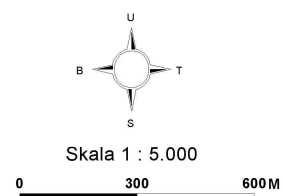
Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah

Kode Wilayah Administrasi
3 3 7 3 0 1 0 0 0 5

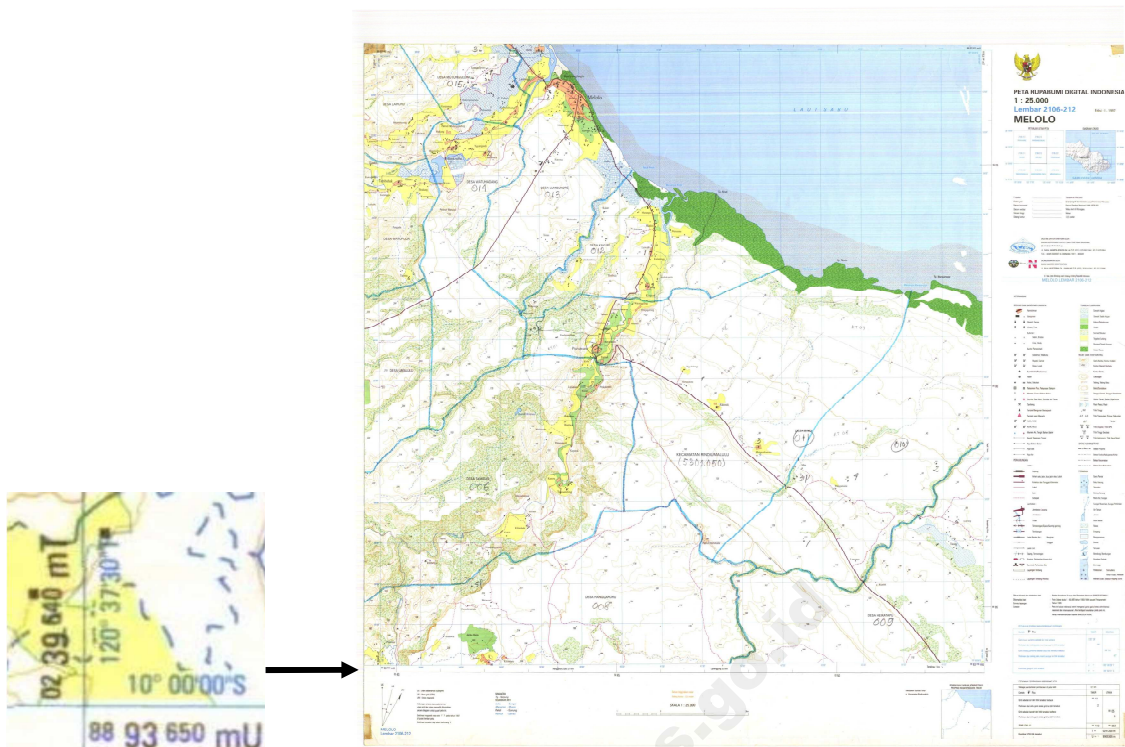


Batas Wilayah Administrasi:
 Batas Kelurahan

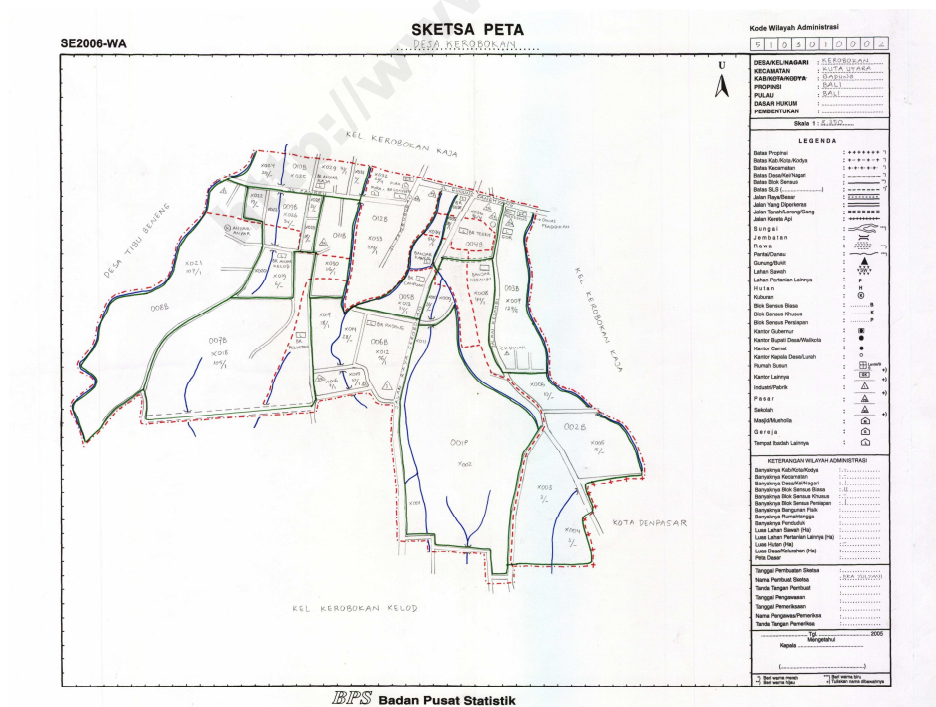
Sumber Data:
- Citra Satelit Ikonos
- Batas Administrasi
- Sketsa Peta dan data Atribut



Gambar 2.1. Contoh peta dasar berupa *print out* citra satelit



Gambar 2.2. Contoh peta dasar yang mempunyai koordinat bumi (Peta Rupabumi Bakosurtanal)



Gambar 2.3. Contoh peta dasar yang tidak memiliki koordinat bumi (Sketsa Peta-WA BPS)

2.3. Wilayah Administrasi

Secara administratif, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam beberapa wilayah secara berjenjang mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

2.3.1. Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten (UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

2.3.2. Kelurahan

Kelurahan adalah satuan wilayah yang dipimpin oleh seorang Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan atau daerah kota di bawah kecamatan (UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Dalam kegiatan Pemetaan SP2010, wilayah administrasi yang dipetakan adalah desa, kelurahan, dan nama lain yang setara dengan desa. Di buku ini, kelurahan dan nama lain yang setara dengan desa selanjutnya disebut **desa**.

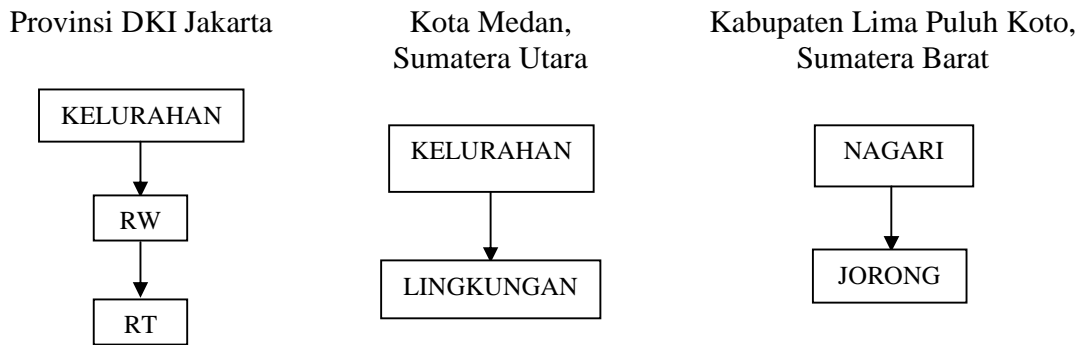
Untuk desa baru, sketsa petanya dibuat apabila ada dasar hukum pembentukannya, yaitu Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati, serta sudah operasional.

2.4. Satuan Lingkungan Setempat (SLS)

SLS adalah satuan lingkungan di bawah desa/kelurahan. Istilah SLS bisa berbeda antar daerah, misalnya rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dusun, jorong, lingkungan dan sebagainya.

Hirarki SLS dapat berbeda antar wilayah, seperti digambarkan pada bagan di Gambar 2.4. SLS terkecil (yang paling kecil wilayahnya) disebut SLS Tingkat I, contohnya RT di Kota Jakarta, Lingkungan di Kota Medan, dan Jorong di Kabupaten

Lima Puluh Koto. Jika ada SLS yang satu tingkat lebih tinggi dari SLS terkecil, contohnya RW di DKI Jakarta, SLS ini disebut SLS Tingkat II, dan seterusnya.



Gambar 2.4. Contoh hirarki SLS

Pemberian nama/nomor SLS mengikuti nama/nomor SLS di setiap daerah, contoh: RT 13/09 di DKI Jakarta, Lingkungan V Kampung Durian di Kota Medan, Jorong Batu Tanyuah di Kabupaten Lima Puluh Koto,.

Batas SLS dapat berupa batas alam ataupun buatan, baik yang mudah dikenali maupun yang tidak mudah dikenali, misalnya jalan, sungai, saluran air, dinding rumah, tanah kosong, dan lain-lain.

SLS yang digunakan sebagai dasar pembentukan BS adalah SLS terkecil (SLS Tingkat I) yang secara operasional mempunyai kewenangan administratif. Apabila di suatu desa ada wilayah yang tidak masuk ke SLS mana pun, maka wilayah tersebut dimasukkan sebagai bagian dari wilayah SLS terdekat jika wilayahnya kecil. Tetapi jika wilayahnya cukup besar, bisa dibentuk menjadi satu SLS khusus dan diberi nama K01, K02, K03, dan seterusnya.

2.4.1. Dusun/Lingkungan

Dusun/lingkungan adalah bagian wilayah dalam desa/kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun Dalam Desa dan Lingkungan Dalam Kelurahan.

2.4.2. Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)

Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai

kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan. Setiap RT sebanyak-banyaknya terdiri dari 30 kepala keluarga (KK) untuk desa dan sebanyak-banyaknya 50 KK untuk kelurahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Khusus di Provinsi DKI Jakarta, RW diperlakukan sama seperti desa. Wilayah yang dipetakan pada blangko SP2010-WA adalah wilayah RW, dan daftar SP2010-RD digunakan untuk merekap jumlah BS dan SLS, perkiraan jumlah muatan serta keterangan lain yang berkaitan dengan BS/SLS dalam satu RW.

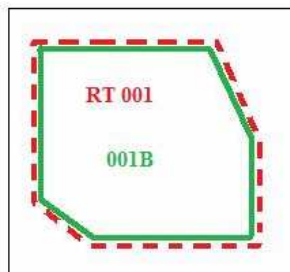
2.5. Blok Sensus SP2010 (BS)

Blok Sensus (BS) adalah wilayah kerja pencacahan yang merupakan bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan.

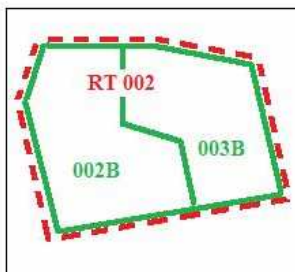
2.5.1. Syarat Blok Sensus

Syarat BS adalah sebagai berikut:

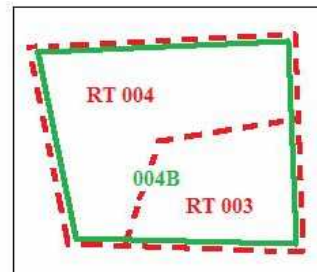
1. Membagi habis desa menjadi beberapa blok sensus.
2. BS dibentuk berdasarkan SLS. Satu BS bisa terdiri dari satu SLS utuh (Gambar 2.5.), bagian dari suatu SLS (Gambar 2.6.) atau gabungan dari beberapa SLS utuh (Gambar 2.7.) dengan mempertimbangkan batas jelas dan muatan. SLS yang dibagi menjadi dua BS atau lebih, batas BS harus merupakan batas yang jelas dan mudah dikenali, baik batas alam maupun buatan.



Gambar 2.5. Satu BS terdiri dari satu SLS utuh



Gambar 2.6. Satu BS merupakan bagian dari suatu SLS



Gambar 2.7. Satu BS gabungan dari beberapa SLS utuh

Jika di desa tidak terdapat SLS, maka batas BS harus merupakan batas yang jelas dan tidak mudah berubah, baik batas alam atau buatan.

3. Satu blok sensus harus terletak pada satu hamparan, tidak boleh terpisah oleh blok sensus lain.

2.5.2. Jenis Blok Sensus

BS dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:

1. BS Biasa, memiliki muatan sekitar 100 (minimum 80 dan maksimum 120) rumah tangga/bangunan sensus bukan tempat tinggal (BSBTT)/bangunan sensus tempat tinggal kosong (BSTT kosong) atau kombinasi ketiganya dalam satu hamparan (tidak dipisahkan oleh blok sensus lain), dan diperkirakan tidak akan berubah dalam jangka waktu lebih kurang 10 tahun.

Jumlah rumah tangga dapat didekati dengan jumlah kepala keluarga (KK). Jika suatu bangunan sensus digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat usaha maka muatannya dianggap sebagai satu rumah tangga.

2. BS Khusus.

BS Khusus merupakan BS yang akses masuk ke lokasinya terbatas untuk umum, misalnya asrama/barak militer, asrama perawat/pelajar/mahasiswa, pondok pesantren, panti asuhan dengan 100 penghuni atau lebih, dan lembaga pemasyarakatan (tidak dibatasi muatannya).

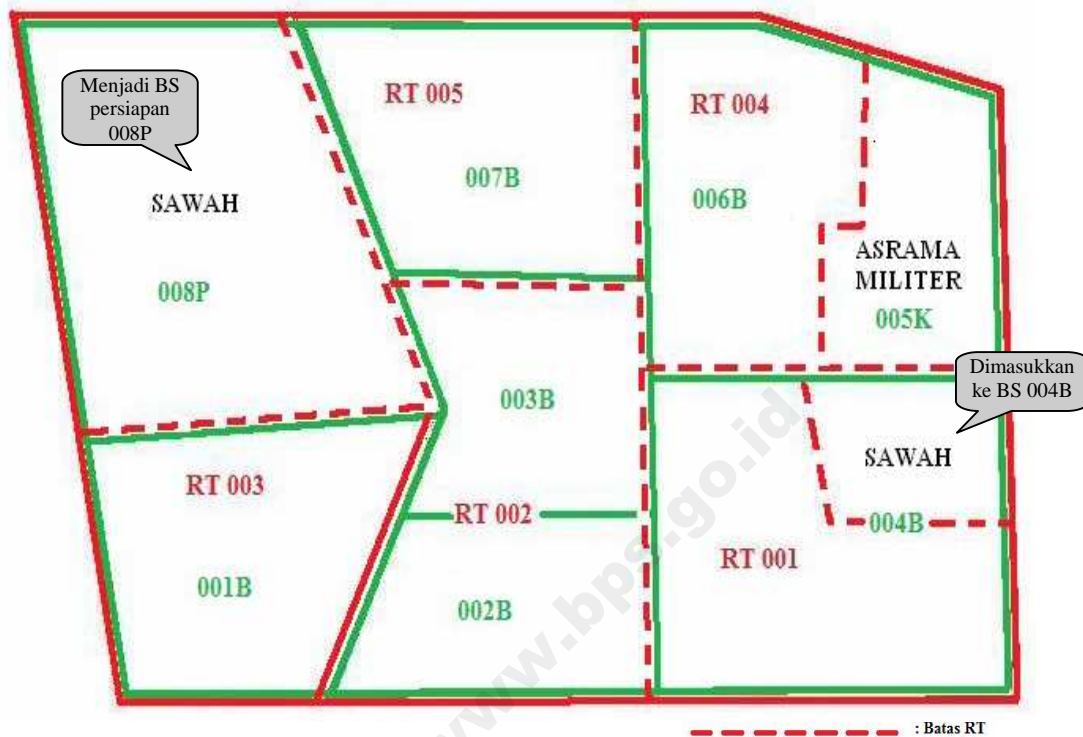
3. BS Persiapan.

BS Persiapan adalah wilayah kosong yang terpisah dari pemukiman seperti sawah, perkebunan, hutan, rawa, termasuk wilayah kosong yang telah direncanakan akan digunakan untuk daerah pemukiman penduduk atau tempat usaha.

Untuk sawah, ladang, tanah kosong yang tidak terlalu luas dan mempunyai batas jelas serta berdampingan atau satu hamparan dengan pemukiman (BS biasa), harus dimasukkan ke dalam BS biasa.

Sebagai contoh, pada Gambar 2.8., sawah di RT 001 berdampingan dan berada satu hamparan dengan BS 003B sehingga dimasukkan sebagai BS 003B. Sedangkan

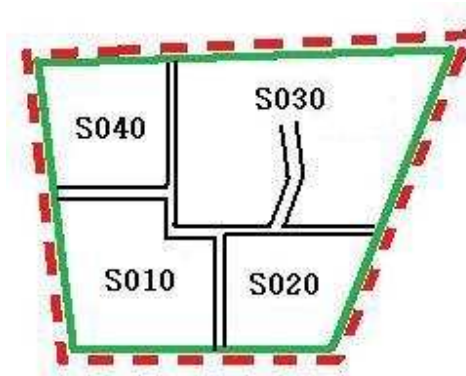
sawah yang berada di ujung kiri atas gambar merupakan sawah yang tidak masuk ke RT mana pun sehingga dibentuk menjadi BS persiapan tersendiri (008P).



Gambar 2.8. Contoh sawah sebagai bagian dari BS Biasa (004B) dan sawah sebagai BS Persiapan (008P)

2.6. Segmen

Segmen adalah wilayah yang merupakan bagian dari suatu BS, mempunyai batas jelas baik batas alam atau buatan seperti sungai/kali, jalan, gang/lorong. Luas segmen tidak dibatasi oleh jumlah muatan tetapi mengacu pada batas jelas yang ada. Contoh segmen dapat dilihat pada Gambar 2.9.



Gambar 2.9. Contoh segmen

2.7. Rumah Tangga

Rumah tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Makan dari satu dapur diartikan sebagai pengurusan kebutuhan bersama sehari-hari di bawah satu pengelolaan.

2.8. Keluarga dan Kepala Keluarga (KK)

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan (Departemen Kesehatan RI, 1998). Keluarga yang dimaksud di sini adalah keluarga yang benar-benar tinggal di SLS yang bersangkutan. Keluarga yang terdaftar tetapi tidak tinggal di SLS tersebut tidak dicakup dalam kegiatan ini. Kepala Keluarga (KK) adalah orang yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah keluarga.

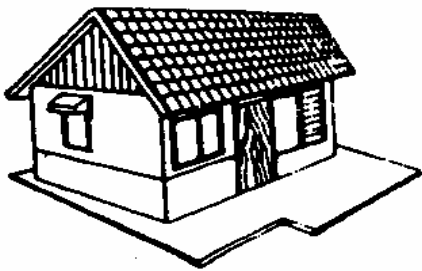
Untuk bangunan yang dijadikan tempat kos atau disewakan per kamar, penghitungan jumlah rumah tangga/KK didekati dengan jumlah kamar yang dijadikan tempat kos atau disewakan

2.9. Bangunan Fisik

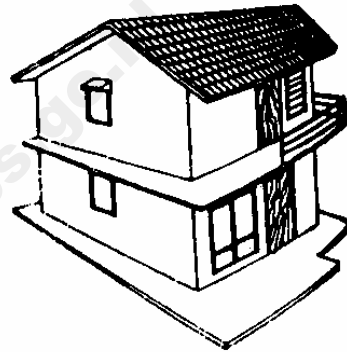
Bangunan Fisik adalah tempat berlindung tetap maupun sementara, yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.

Bangunan yang tidak digunakan untuk tempat tinggal atau usaha, dianggap sebagai satu bangunan fisik jika luas lantainya lebih dari atau sama dengan 10 m^2 . Sedangkan bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal atau usaha, walaupun luas lantainya kurang dari 10 m^2 , tetap dianggap satu bangunan fisik. Khusus tempat usaha, yang tidak mempunyai dinding dianggap sebagai satu bangunan fisik.

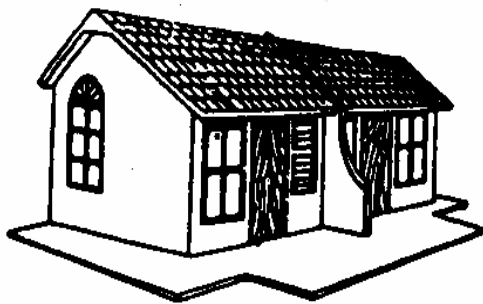
Menurut jenisnya, bangunan fisik dapat dibedakan atas bangunan tunggal tidak bertingkat (Gambar 2.10), bangunan tunggal bertingkat (Gambar 2.11), bangunan gandeng dua tidak bertingkat (Gambar 2.12), dan bangunan tunggal bertingkat banyak (Gambar 2.13).



Gambar 2.10. Bangunan tunggal tidak bertingkat



Gambar 2.11. Bangunan tunggal bertingkat



Gambar 2.12. Bangunan gandeng dua tidak bertingkat



Gambar 2.13. Bangunan tunggal bertingkat banyak

2.10. Bangunan Sensus

Bangunan sensus adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar/masuk sendiri dalam satu kesatuan fungsi/penggunaan.

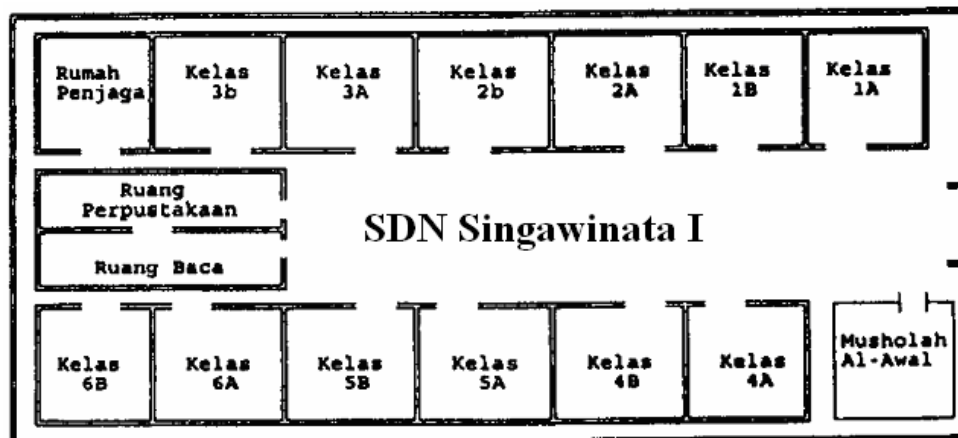
Menurut penggunaannya bangunan sensus dibagi menjadi :

1. Bangunan sensus tempat tinggal (BSTT), yaitu bangunan sensus yang seluruhnya digunakan untuk tempat tinggal, termasuk bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal tetapi belum dihuni (BSTT kosong). Misalnya di suatu perumahan beberapa rumah telah selesai dibangun dan belum ada penghuninya, maka rumah-rumah itu disebut sebagai BSTT kosong.
2. Bangunan sensus bukan tempat tinggal (BSBTT), yaitu bangunan sensus yang seluruhnya digunakan bukan untuk tempat tinggal, misalnya toko, restoran, salon, tempat ibadah, rumah sakit, pabrik, sekolah, gedung kantor, balai pertemuan, dan sebagainya. Untuk tempat usaha seperti pasar dan mall, tiap kios dihitung sebagai satu BSBTT. Informasi ini didapat dari pengelola mall/pasar/gedung.
3. Bangunan sensus campuran, yaitu bangunan sensus yang sebagian digunakan untuk tempat tinggal dan sebagian lainnya digunakan untuk keperluan lain, misalnya rumah-toko (ruko), rumah-kantor (rukan).

Penjelasan:

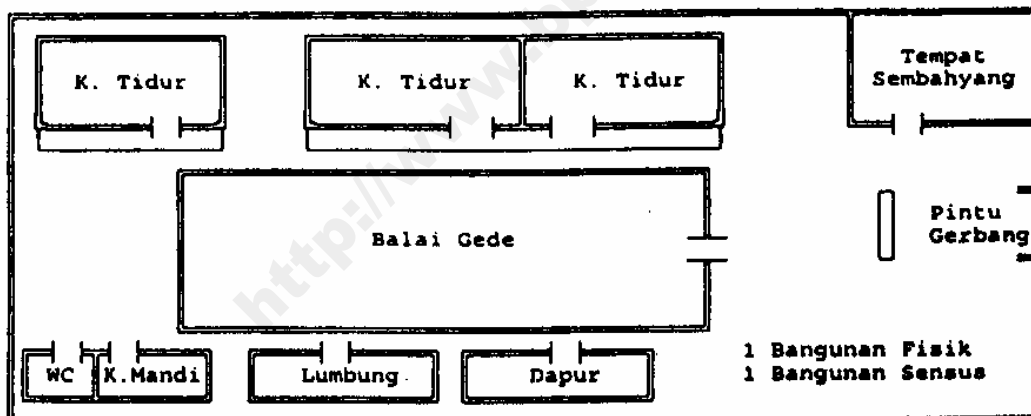
- a. Untuk bangunan fisik bukan tempat tinggal seperti kantor, pabrik, dan sekolah, maka tidak setiap ruangan yang mempunyai pintu keluar masuk tersendiri dihitung sebagai satu bangunan sensus, melainkan melihat pada kegunaan dari masing-masing ruangan.

Sebagai contoh, di kompleks sekolah SDN Singawinata I terdapat 12 ruang kelas, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang baca, 1 rumah penjaga, dan 1 musholah, denahnya dapat dilihat pada Gambar 2.14. Ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang baca, dan musholah yang terletak dalam kompleks sekolah dianggap mempunyai satu kesatuan fungsi/penggunaan, yaitu sarana pendidikan. Sedangkan rumah penjaga mempunyai fungsi yang berbeda, yaitu tempat tinggal. Dengan demikian, kompleks sekolah SDN Singawinata I dianggap memiliki satu bangunan fisik dan dua bangunan sensus.



Gambar 2.14. Denah kompleks sekolah yang dianggap terdiri dari 1 bangunan fisik dan 2 bangunan sensus

- b. Bangunan dapur, kamar mandi, garasi dan lainnya yang terpisah dari bangunan induknya tetapi merupakan satu kesatuan penggunaan, pada Pemetaan SP2010 dianggap sebagai bagian dari bangunan induknya (tidak merupakan bangunan fisik/sensus tersendiri). Contohnya seperti denah rumah di Bali pada Gambar 2.15.



Gambar 2.15. Denah rumah di Bali yang dianggap 1 bangunan fisik dan 1 bangunan sensus

2.11. Batas Alam dan Buatan

2.11.1. Batas Alam

Batas alam adalah batas wilayah yang terbentuk oleh alam, misalnya sungai, pantai, dan danau.

2.11.2. Batas Buatan

Batas buatan adalah batas wilayah yang dibentuk oleh manusia, misalnya jalan raya, jalan kereta api, jalan desa/kelurahan, tembok dan saluran irigasi.

2.12. Kriteria Muatan Blok Sensus Dominan

Kriteria muatan BS dominan adalah jenis muatan yang paling banyak terdapat di dalam BS biasa atau khusus. Muatan BS yang dominan terbagi atas kriteria-kriteria berikut:

2.12.1. Pemukiman biasa, adalah lingkungan hunian yang terdiri dari beberapa tempat tinggal biasa.

2.12.2. Perumahan mewah/elite/real estate, adalah lingkungan hunian yang terdiri dari beberapa tempat tinggal yang biasanya ditandai dengan:

- a. Adanya kendaraan roda empat.
- b. Adanya pengamanan khusus.
- c. Bangunannya permanen dengan luas minimal 200 M².

2.12.3. Pemukiman kumuh, adalah suatu wilayah yang terdiri dari beberapa tempat tinggal yang biasanya ditandai oleh:

- a. Banyak rumah tidak layak huni.
- b. Banyak saluran pembuangan limbah yang macet.
- c. Penduduk/bangunan sangat padat.
- d. Banyak penduduk yang buang air besar tidak di jamban.
- e. Biasanya berada di areal marginal (seperti di tepi sungai, pinggir rel kereta api atau lainnya).

2.12.4. Barak/asrama/pondok pesantren

2.12.5. Kawasan industri

2.12.6. Pertokoan/pasar/perkantoran (termasuk kampus/sekolah)

2.12.7. Hotel/tempat rekreasi

2.12.8. Persiapan/kosong (termasuk hutan/pesawahan)

2.13. Apartemen dan Kelompok Bangunan Usaha

Informasi keberadaan apartemen dan/atau kelompok bangunan usaha dalam tiap BS sangat diperlukan dalam kegiatan sensus atau survei BPS di masa datang. Definisi apartemen dan/atau kelompok bangunan usaha yang digunakan dalam kegiatan Pemetaan SP2010 yaitu:

2.13.1. Apartemen/kondominium/flat, adalah bangunan dengan banyak lantai yang digunakan sebagai tempat tinggal, baik untuk disewakan maupun milik sendiri. Apartemen/kondominium dilengkapi fasilitas yang lengkap seperti keamanan, *sport center*, *laundry*, *mini market*, restoran, dan lain-lain. Sedangkan flat tidak dilengkapi fasilitas seperti di atas.

2.13.2. Kelompok bangunan usaha, adalah kelompok bangunan yang terdiri dari toko/kantor dengan jumlah minimal 10 bangunan.

Bab

3

DASAR-DASAR PEMETAAN

Setelah mempelajari BAB 3, petugas pemeta memahami dasar-dasar pemetaan serta tata cara menggambar sketsa peta yang sesuai dengan aturan baku.

3.1 Unsur-Unsur Peta

Untuk memudahkan pembacaan peta, maka peta harus mempunyai judul, arah mata angin, skala, legenda, referensi geografis dan keterangan penting lainnya (nama wilayah yang berbatasan, nama jalan, nama sungai, dan sebagainya).

3.1.1 Judul

Judul peta harus singkat dan jelas sehingga pembaca mengerti apa yang terkandung dalam peta tersebut. Judul pada blangko SP2010-WA dan SP2010-WB terletak di tengah atas.

3.1.2 Arah Mata Angin

Arah mata angin merupakan petunjuk arah Utara-Selatan peta. Pada blangko SP2010-WA dan SP2010-WB, arah mata angin sudah tercantum di sudut kanan atas.



Gambar 3.1. Arah mata angin

Arah utara peta yang digambar harus sesuai dengan arah utara pada arah mata angin yang tertera pada blangko sketsa peta. Bila tidak sesuai, arah mata angin yang tertera pada blangko sketsa peta dicoret, kemudian buatlah arah mata angin yang sesuai untuk sketsa peta yang digambar.

3.1.3 Skala

Skala adalah perbandingan jarak antara dua titik pada peta dengan jarak antara dua titik sebenarnya di lapangan.

1. Jenis Skala

Jenis skala ada dua, yaitu:

- Skala numerik adalah skala yang dinyatakan dalam bilangan perbandingan. Umumnya tertulis dengan 1 : X.

Contoh:

1 : 50.000 artinya 1 cm di peta sama dengan 50.000 cm atau 500 m di lapangan.

Makin besar angka X untuk wilayah yang sama maka gambarnya makin kecil. Dengan demikian peta dengan skala 1 : 50.000 akan tergambar lebih besar dibanding peta dengan skala 1 : 100.000.

- Skala grafis adalah skala yang dinyatakan dalam bentuk garis yang diberi ukuran. Biasanya ukurannya dalam kilometer. Pada peta berskala grafis selalu dicantumkan jarak antar dua titik dengan panjang tertentu. Pada Gambar 3.2., jarak dari 0 ke 1 di peta menunjukkan jarak 1 km di lapangan.



Gambar 3.2. Skala grafis

Untuk mengkonversikan skala grafis ke skala numerik, lakukan hal-hal berikut:

- Ukur panjang ruas garis dari 0 ke 1, misalkan jaraknya 2 cm.
- Hitung angka perbandingannya: $2 \text{ cm} : 1 \text{ km} = 2 \text{ cm} : 100.000 \text{ cm} = 1 : 50.000$.

Jika pada peta dasar terdapat skala numerik dan skala grafis, lakukan konversi skala grafis ke skala numerik untuk memastikan kebenaran skala numerik pada peta dasar.

2. Menghitung Skala Peta yang Diperbesar

Jika peta yang mempunyai skala 1 : X diperbesar n kali, maka skala peta yang diperbesar adalah: $n \times (1/X) = n/X = 1 : (X/n)$.

Contoh: Terdapat sketsa peta desa berskala 1 : 10.000. Salah satu peta SLS yang

terdapat pada sketsa peta desa tersebut akan diperbesar 4 kali. Maka skala peta SLS yang diperbesar adalah $4 \times 1/10.000 = 4/10.000 = 1/2.500 \rightarrow 1 : 2500$.

3. Memperkirakan Skala

Seandainya pada peta dasar yang tersedia tidak tercantum skalanya, maka skala dapat diperkirakan dengan cara sebagai berikut:

- Tentukan detail (obyek) yang jelas, baik pada peta maupun di lapangan, misalnya sebagian panjang jalan.
- Ukur panjang jalan di lapangan, kemudian ukur panjang jalan tersebut yang digambar pada peta.
- Bandingkan panjang jalan di peta dengan di lapangan. Misalnya panjang jalan di peta 5 cm, sedangkan panjang jalan sebenarnya di lapangan 125 m, maka perkiraan skala adalah $5 \text{ cm} : 125 \text{ m} = 5 \text{ cm} : 12.500 \text{ cm} = 1 : 2.500$.

3.1.4 Legenda

Legenda adalah daftar simbol yang harus ada dalam penyajian peta. Tanpa legenda pembaca akan sulit mendapatkan gambaran tentang informasi yang disajikan. Legenda terdapat pada kolom sebelah kanan blangko SP2010-WA dan SP2010-WB.

Simbol-simbol yang terdapat pada legenda di antaranya adalah batas wilayah administrasi yang dibedakan menurut tingkatannya, dan jalan yang dibedakan menurut jenisnya.

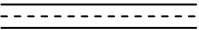
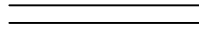
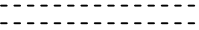
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 2000, batas wilayah administrasi yang digambarkan dalam sketsa peta adalah:

1. Batas provinsi : 
2. Batas kabupaten/kota : 
3. Batas kecamatan : 
4. Batas desa/kelurahan : 

Untuk BS, SLS tingkat II, dan SLS tingkat I, batasnya digambarkan seperti berikut:

1. Batas blok sensus : 
2. Batas SLS tingkat II : 
3. Batas SLS tingkat I : 

Menurut jenisnya, jalan yang digambarkan pada sketsa peta dibedakan atas:

1. Jalan raya/besar ()
Jalan raya/besar adalah jalan yang permukaannya aspal atau beton dan dapat dilalui kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
2. Jalan yang diperkeras ()
Jalan yang diperkeras adalah jalan yang permukaannya belum diaspal atau dibeton, tetapi sudah diperkeras dengan lapisan kerikil, pasir, dan sebagainya serta dapat dilalui kendaraan bermotor beroda empat atau lebih.
3. Jalan tanah/lorong/gang ()
Jalan tanah adalah jalan yang permukaannya masih tanah. Lorong/gang biasanya sudah diperkeras dan hanya dapat dilalui oleh kendaraan bermotor maksimum roda tiga.

3.2 Penggambaran Peta

Pada waktu melakukan penggambaran peta, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Batas wilayah administrasi dan SLS digambar dengan warna merah, sedangkan batas BS dengan warna hijau. Sungai, danau, rawa, dan pantai digambar dengan warna biru.
2. Pada penggambaran sketsa peta desa SP2010-WA, bila suatu desa berbatasan dengan wilayah administrasi yang lebih tinggi, maka yang digambarkan adalah batas wilayah administrasi yang lebih tinggi. Sebagai contoh, desa yang berbatasan dengan kecamatan, maka batas yang harus digambarkan adalah batas kecamatan.
3. Pada penggambaran sketsa peta blok sensus SP2010-WB, bila suatu BS berbatasan dengan wilayah administrasi lain, maka batas BS dan batas wilayah administrasi digambarkan dua-duanya.
4. Batas alam atau batas buatan seperti jalan raya, jalan kereta api, sungai, dan sebagainya yang menjadi batas luar suatu wilayah harus digambarkan. Jika memungkinkan, batas wilayah digambarkan pada batas alam/buatan tersebut, tetapi jika tidak memungkinkan, batas wilayah digambar di sebelah luar batas alam/buatan tersebut.

5. Unsur harus digambarkan secara proporsional.
Misalnya bila suatu sungai lebih lebar dari pada jalan, maka penggambarannya harus pula demikian.
6. Penggambaran sungai atau jalan jangan berhenti pada batas wilayah, tetapi lanjutkan sedikit melintasi batas wilayah agar tidak kehilangan informasi arah jalan atau sungai tersebut.

3.2.1 Menjiplak Peta

Cara menjiplak peta adalah sebagai berikut:

1. Letakkan kertas *doorslag* di atas peta yang akan dijiplak.
2. Gambarkan semua unsur yang akan dijiplak.

3.2.2 Menyalin Peta

Cara menyalin peta adalah sebagai berikut:

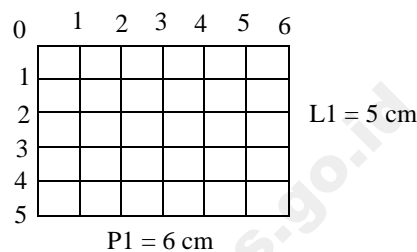
1. Jiplak unsur dan informasi yang dibutuhkan dari peta dasar ke kertas *doorslag*.
2. Buat kotak yang menutupi seluruh area peta yang sudah terjiplak pada kertas *doorslag*, kemudian pada kotak tersebut buat garis mendatar dan tegak dengan jarak yang sama, misalnya 1 cm. Setelah itu garis-garis tersebut diberi nomor dari sebelah kiri atas ke kanan dan dari kiri atas ke bawah mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya.
3. Pada blangko SP2010-WA dan SP2010-WB sudah terdapat garis-garis tegak dan datar yang jaraknya 1 cm. Tentukan kotak di SP2010-WA/SP2010-WB yang akan dijadikan area untuk menggambarkan salinan peta. Beri nomor pada garis-garis di kotak tersebut dari kiri atas ke kanan dan dari kiri atas ke bawah mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya.
4. Dengan petunjuk garis mendatar dan tegak lurus, gambarkan semua unsur yang terdapat dalam peta di kertas *doorslag* pada blangko SP2010-WA/ SP2010-WB sehingga peta yang dibuat sama dan sebangun dengan peta asli yang disalin.

3.2.3 Memperbesar Peta

Untuk menggambar sketsa peta BS, biasanya dilakukan pembesaran peta.

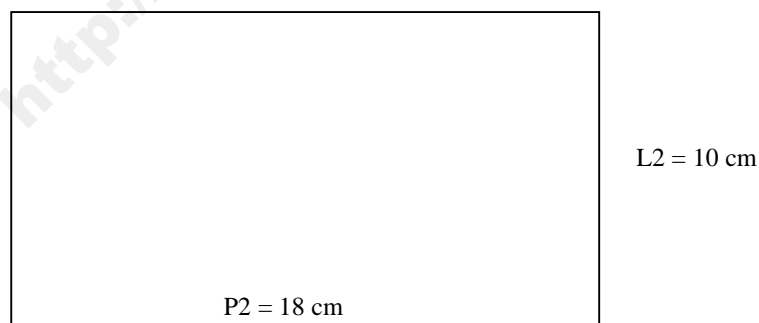
Cara memperbesar peta adalah sebagai berikut:

1. Sediakan peta dasar yang akan dijadikan sebagai acuan dalam memperbesar peta.
2. Jiplak peta wilayah yang akan diperbesar beserta semua informasi yang diperlukan dari peta dasar ke kertas *doorslag*.
3. Buat kotak yang menutupi seluruh area peta yang dijiplak pada kertas *doorslag*, kemudian ukur panjang kedua sisinya. Sisi yang lebih **panjang dimisalkan P1** dan yang lebih **pendek dimisalkan L1**. Kemudian pada kotak tersebut buat garis mendatar dan tegak dengan jarak yang sama, misalnya 1 cm. Setelah itu garis-garis tersebut diberi nomor dari sebelah kiri atas ke kanan dan dari kiri atas ke bawah mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Contohnya dapat dilihat pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3. Contoh ukuran area peta yang akan dijiplak

4. Ukur panjang dan lebar ruang kosong yang disiapkan untuk memperbesar peta pada blangko SP2010-WA/SP2010-WB. Sisi yang lebih panjang dimisalkan P2 dan yang lebih pendek dimisalkan L2 (lihat Gambar 3.4).



Gambar 3.4. Contoh ukuran ruang kosong untuk memperbesar peta

5. Cari nilai perbesaran peta (dimisalkan N). Dari poin 3 dan 4 diperoleh dua alternatif nilai perbesaran, yaitu $P2/P1$ dan $L2/L1$. Ambil nilai yang terkecil sebagai nilai perbesaran.

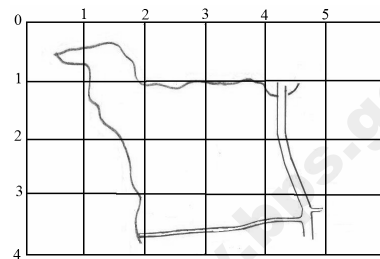
Dari contoh Gambar 3.3. dan 3.4. diperoleh:

$$P2/P1 = 18/6 = 3$$

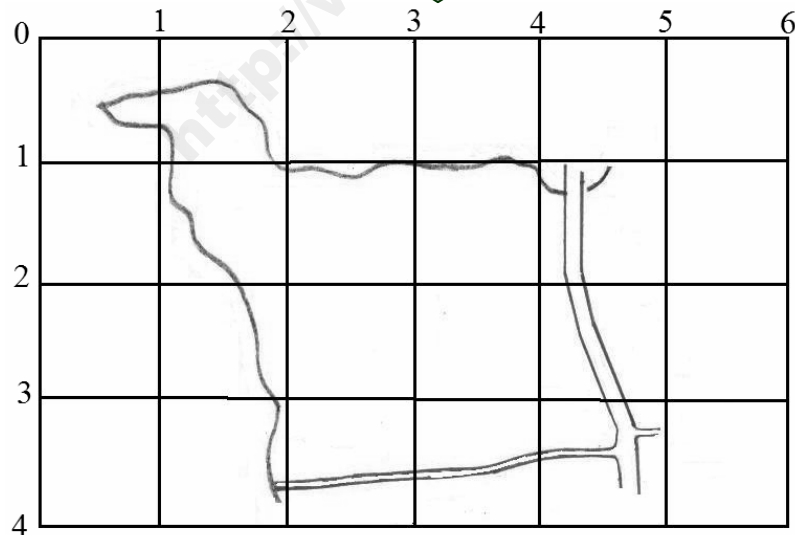
$$L2/L1 = 10/5 = \textcircled{2}$$

Jadi nilai perbesaran yang digunakan adalah 2 kali ($N = 2$).

6. Pada blangko SP2010-WA dan SP2010-WB sudah terdapat garis-garis tegak dan datar yang jaraknya 1 cm. Tentukan kotak di SP2010-WA/SP2010-WB dengan ukuran panjang dan lebar N kali dari panjang dan lebar kotak di kertas *doorslag*. Setiap N cm, beri nomor 0, 1, 2, dan seterusnya pada kotak tersebut mulai dari kiri atas ke kanan dan dari kiri atas ke bawah.
7. Dengan petunjuk garis mendatar dan tegak lurus, gambarkan semua unsur yang terdapat dalam peta dasar sehingga peta yang dibuat sebangun dengan peta asli yang diperbesar.



Sebelum diperbesar

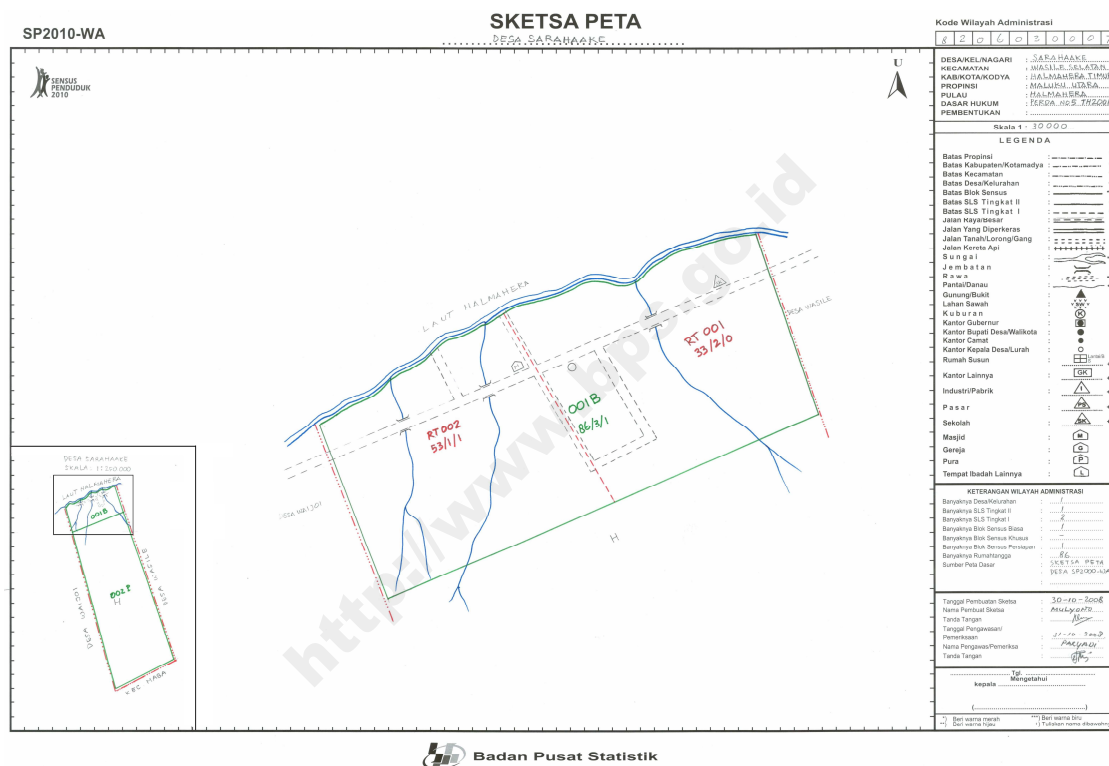


Sesudah diperbesar 2 kali

Gambar 3.5. Contoh perbesaran sketsa peta

3.2.4 Inset Peta

Pembuatan inset peta bertujuan untuk mendapat gambaran yang lebih jelas. Biasanya pembuatan inset dilakukan bila dalam suatu desa terdapat pemukiman padat atau bila suatu desa terdiri dari beberapa wilayah yang terpisah (misalnya kepulauan atau daerah kantong). sebagian wilayah desa terpisah jauh (misalnya daerah kepulauan atau daerah kantong). Pada umumnya inset peta merupakan pembesaran gambar sebagian wilayah yang dipetakan. Untuk itu boleh menggunakan lebih dari satu blangko sketsa peta. Contoh penggambaran inset peta dapat dilihat pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6. Contoh sketsa peta desa dengan inset peta

Bab

4

METODOLOGI

Setelah mempelajari Bab 4, petugas memahami cakupan kegiatan Pemetaan SP2010, serta memahami tahap-tahap penggambaran sketsa peta desa pada blangko SP2010-WA, pembentukan blok sensus, dan penggambaran sketsa peta blok sensus pada blangko SP2010-WB.

4.1 Cakupan Wilayah

Pemetaan SP2010 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, mencakup pembuatan peta dasar, dan pemetaan desa serta BS. Pembuatan peta dasar dilakukan pada Tahun 2008 di seluruh Indonesia. Pembuatan wilayah kerja BS dilakukan pada Tahun 2009, kecuali Kabupaten Muaro Jambi, Kotamadya Jakarta Selatan, Kota Bandung, Kota Salatiga, Kota Surabaya, dan Kota Jayapura, dilaksanakan pada Tahun 2008.

4.2 Cakupan Kegiatan

Secara garis besar kegiatan yang dilakukan dalam Pemetaan SP2010 adalah:

1. Mendapatkan informasi wilayah administrasi yang terbentuk setelah pendataan Podes 2008 dan memutakhirkan MFD di BPS Kabupaten/Kota sesuai kondisi terakhir.
2. Menyempurnakan batas sketsa peta desa berdasarkan hasil olah citra satelit dan/atau sumber lainnya.
3. Menggambar sketsa peta desa dengan batas-batas SLS Tingkat I dan II di dalamnya, serta mencantumkan muatan per SLS Tingkat I pada blangko SP2010-WA.
4. Membentuk BS pada sketsa peta desa berdasarkan batas dan muatan SLS Tingkat I.
5. Menggambar sketsa peta BS Biasa dan BS Khusus pada blangko SP2010-WB.
6. Mengisi daftar SP2010-RD.

4.3 Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan pada kegiatan Pemetaan SP2010 adalah:

1. Batas wilayah administrasi, SLS, dan BS.
2. Nama dan kode wilayah administrasi (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan).
3. Dasar hukum pembentukan desa/kelurahan.
4. Nama, nama ketua dan jumlah SLS terkecil;
5. Perkiraan jumlah rumah tangga, bangunan sensus bukan tempat tinggal (BSBTT), dan bangunan sensus tempat tinggal kosong (BSTT kosong) per SLS tingkat I dan per BS.

4.4 Jenis Dokumen yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam Pemetaan SP2010 adalah:

1. Peta dasar, peta dasar yang digunakan adalah:
 - a. *Print out* citra satelit
 - b. Peta yang memiliki koordinat bumi, misalnya peta rupabumi Bakosurtanal, peta topografi Dittopad, dan peta Pajak Bumi dan Bangunan.
 - c. Peta yang tidak memiliki koordinat bumi, misalnya sketsa peta WA BPS, sketsa peta dari kantor desa/kelurahan.
2. Sketsa Peta Desa BPS SE2006-WA/ST2003WA/SP2000-WA, sebagai rujukan awal untuk mengidentifikasi batas desa dan informasi penting di dalamnya.
3. Blangko SP2010-WA, adalah blangko yang digunakan untuk menggambar sketsa peta desa (RW di DKI Jakarta).
4. Blangko SP2010-WB, adalah blangko yang digunakan untuk menggambar sketsa peta BS.
5. Daftar SP2010-RD, adalah daftar yang digunakan untuk merekap jumlah SLS dan BS, perkiraan jumlah muatan, serta keterangan lainnya yang berkaitan dengan SLS/BS dalam satu desa (RW untuk DKI Jakarta).
6. Kertas doorslag, adalah kertas tembus pandang yang digunakan sebagai alat bantu dalam kegiatan Pemetaan SP2010.
7. Buku Pedoman Kepala BPS Provinsi/Kabupaten/Kota disebut Buku 1, adalah buku pedoman kegiatan Pemetaan SP2010 untuk Kepala BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.

8. Buku Pedoman Instruktur Nasional Instruktur Daerah disebut Buku 2, adalah buku pedoman kegiatan Pemetaan SP2010 untuk instruktur nasional dan instruktur daerah.
9. Buku Pedoman Pemeta Desa dan Blok Sensus disebut Buku 3, adalah buku pedoman kegiatan Pemetaan SP2010 untuk petugas pemeta.
10. Buku Pedoman Pengawas disebut Buku 4, adalah buku pedoman kegiatan Pemetaan SP2010 untuk petugas pengawas.

4.5 Tahap-Tahap Kegiatan dalam Penggambaran Sketsa Peta Desa dan Blok Sensus

Tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dalam penggambaran sketsa peta desa dan BS meliputi persiapan penggambaran sketsa peta desa dan BS, pembentukan blok sensus, penomoran blok sensus, penggambaran sketsa peta desa pada blangko SP2010-WA, dan penggambaran sketsa peta BS pada blangko SP2010-WB. Secara garis besar, alur kerja petugas pemeta dan pengawas/pemeriksa dapat dilihat pada Gambar 4.1. dan 4.2.

4.5.1 Persiapan Penggambaran Sketsa Peta Desa dan Blok Sensus

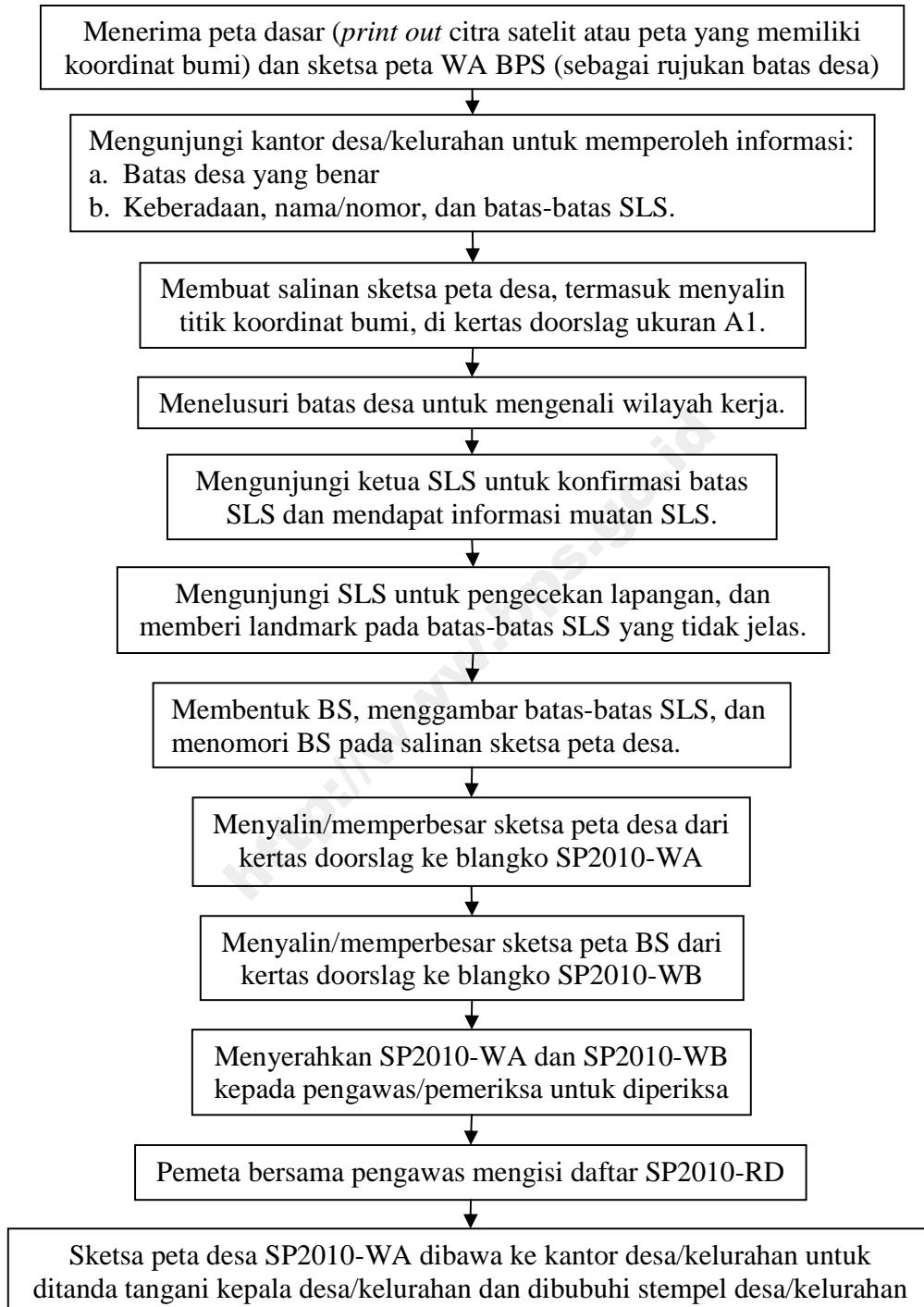
Untuk penggambaran sketsa peta desa dan BS, peta dasar yang digunakan dapat berupa *print out* citra satelit, peta yang memiliki koordinat bumi, atau peta yang tidak memiliki koordinat bumi. Tahap persiapan penggambaran sketsa peta yang peta dasarnya berupa *print out* citra satelit atau peta yang memiliki koordinat bumi adalah sama, sedangkan untuk peta dasar yang tidak memiliki koordinat bumi, tahap persiapan penggambaran sketsa peta desanya berbeda.

Berikut ini adalah tahap persiapan penggambaran sketsa peta desa menurut peta dasar yang digunakan.

A. Persiapan Penggambaran Sketsa Peta Desa dan Blok Sensus dengan Menggunakan Peta Dasar berupa Print Out Citra Satelit atau Peta yang Memiliki Koordinat Bumi

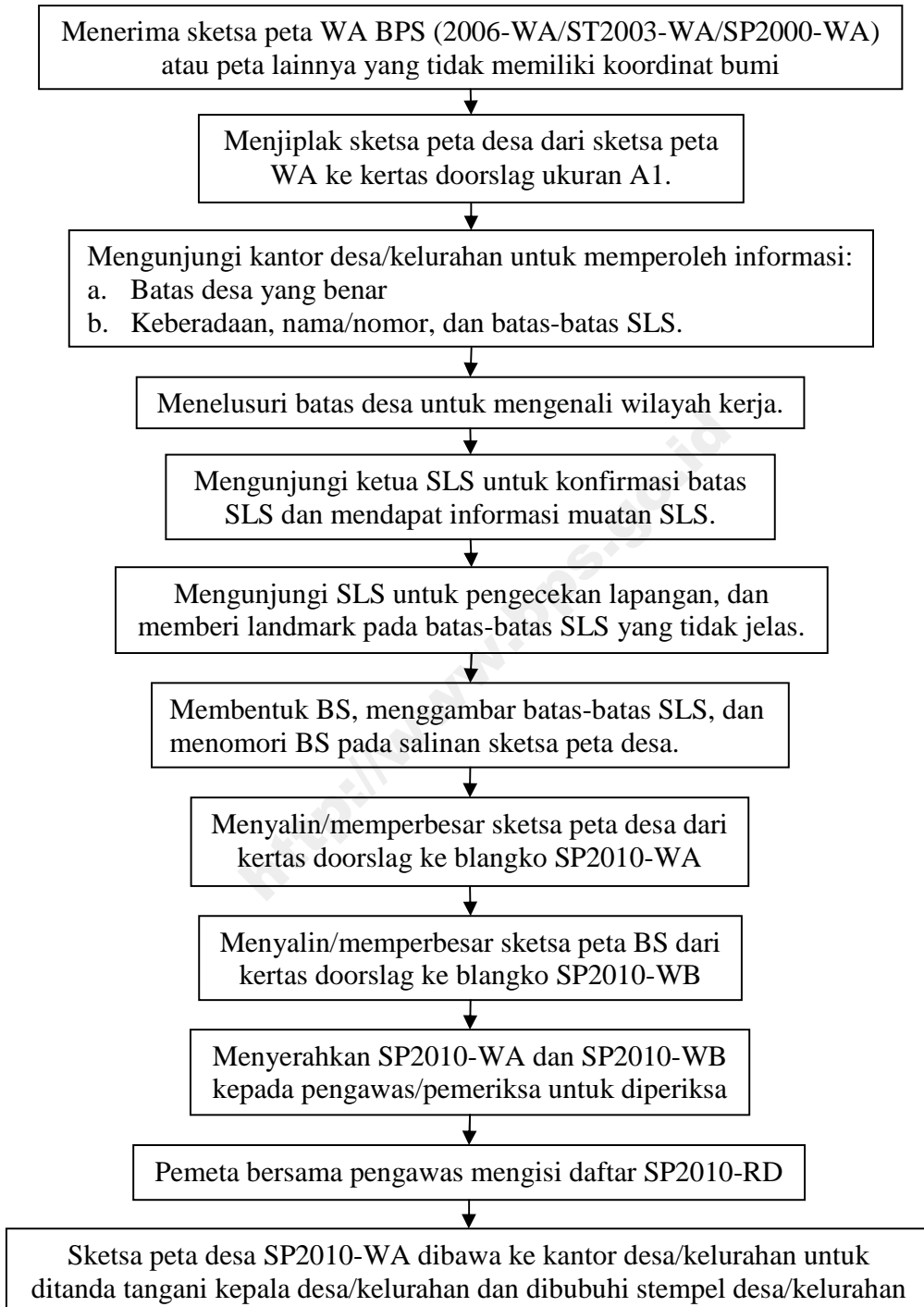
Tahap-tahap yang dilakukan dalam persiapan penggambaran sketsa peta desa dengan menggunakan peta dasar berupa *print out* citra satelit atau peta yang memiliki koordinat bumi adalah sebagai berikut.

**ALUR KERJA PETUGAS PEMETA DAN PENGAWAS/PEMERIKSA
YANG MENGGUNAKAN PETA DASAR BERUPA PRINT OUT CITRA
SATELIT ATAU PETA YANG MEMILIKI KOORDINAT BUMI**



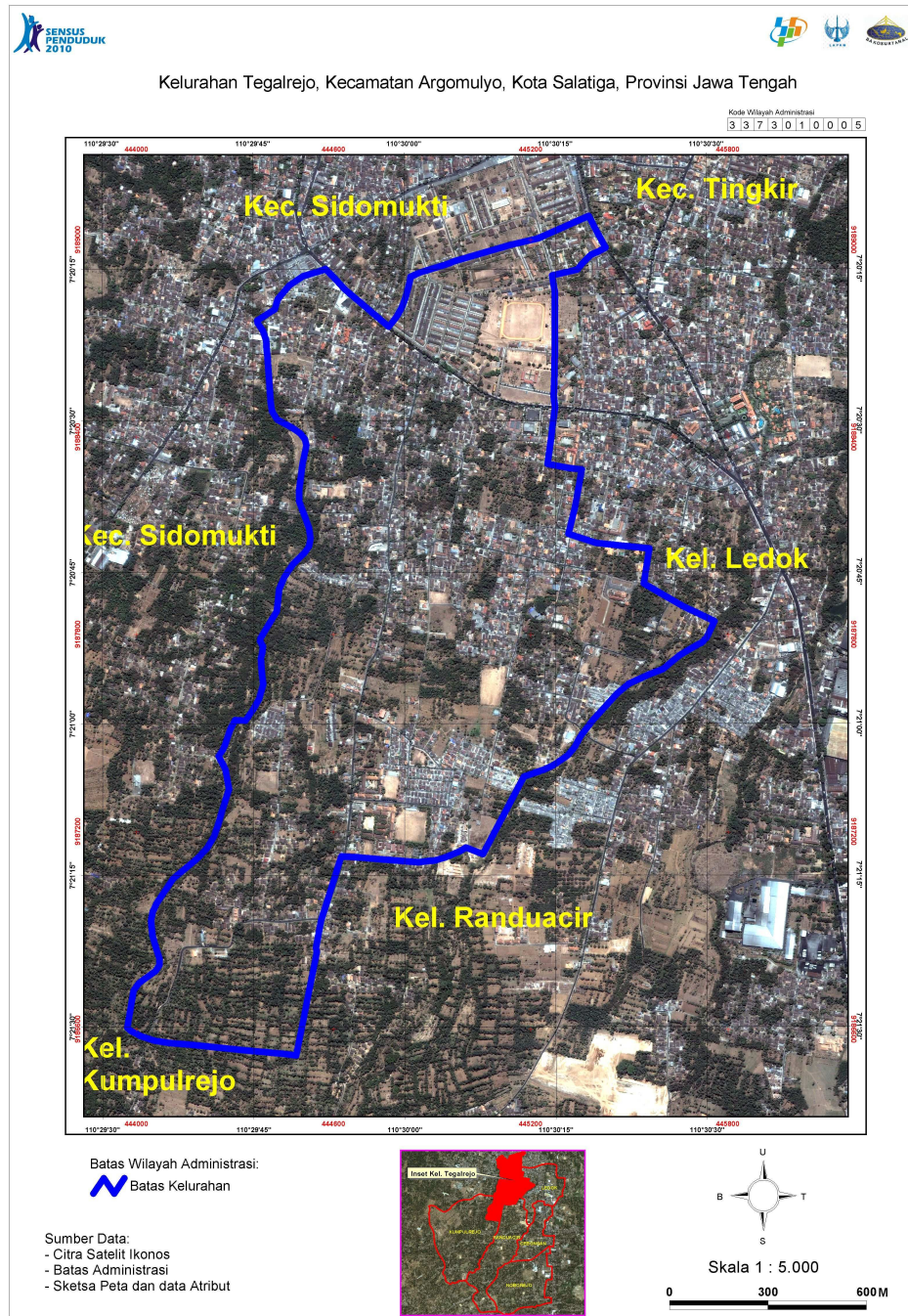
Gambar 4.1. Alur Kerja Petugas Pemeta dan Pengawas/Pemeriksa yang Menggunakan Peta Dasar Citra atau Peta yang Memiliki Koordinat Bumi

ALUR KERJA PETUGAS PEMETA DAN PENGAWAS/PEMERIKSA
YANG MENGGUNAKAN PETA DASAR SKETSA PETA WA BPS
ATAU PETA LAIN YANG TIDAK MEMILIKI KOORDINAT BUMI



Gambar 4.2. Alur Kerja Petugas Pemeta dan Pengawas/Pemeriksa yang Menggunakan Peta Dasar Citra atau Peta yang Tidak Memiliki Koordinat Bumi

1. Pemeta desa menerima peta dasar dan sketsa peta WA BPS rujukan (Sketsa Peta SE2006-WA/ST2003-WA/SP2000-WA). Contoh peta dasar yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 4.3., contoh sketsa peta WA BPS rujukan dapat dilihat pada Gambar 4.4.

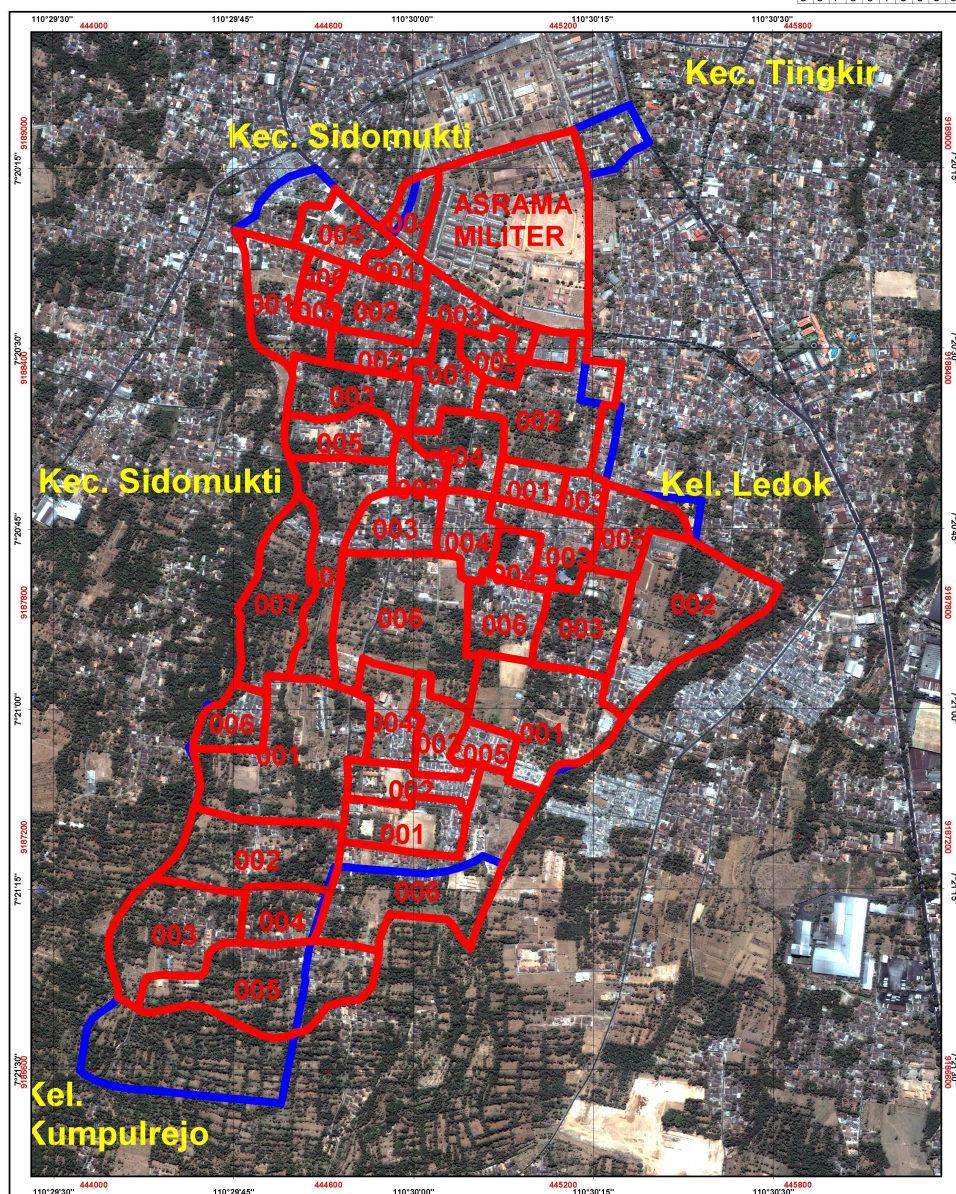


Gambar 4.3. Contoh peta dasar suatu desa yang bersumber dari *print out* citra satelit



Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah

Kode Wilayah Administrasi

3 3 7 3 0 1 0 0 0 5

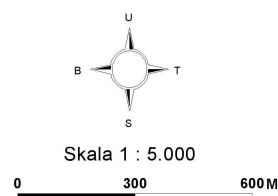


Batas Wilayah Administrasi:

-  Batas Kelurahan/RT Sesudah Perbaikan
-  Batas Kelurahan Sebelum Perbaikan

Sumber Data:

- Citra Satelit Ikonos
- Batas Administrasi
- Sketsa Peta dan data Atribut



Gambar 4.5. Contoh penggambaran batas SLS hasil kunjungan ke kantor desa pada *print out* citra satelit

4. Buat salinan sketsa peta desa di kertas *doorslag* ukuran A1 dengan cara berikut.

- a. Jiplak batas desa dan batas-batas SLS pada peta dasar ke kertas *doorslag*.

Jika ada SLS yang wilayahnya dianggap terlalu kecil untuk menggambarkan batas-batas segmen di dalamnya, atau diketahui sebagai daerah padat sehingga diperkirakan harus dibagi menjadi beberapa BS, lakukan perbesaran gambar SLS tersebut pada kertas *doorslag* yang lain (ukuran A3). Dengan demikian diperoleh salinan sketsa peta SLS yang nantinya akan digunakan sebagai alat bantu pada saat penggambaran sketsa peta BS di blangko SP2010-WB.

- b. Gambarkan minimal 4 (empat) titik yang koordinat buminya diketahui dengan simbol + dan tuliskan koordinat bumi tersebut di atas simbol +.
- c. Salin unsur-unsur alam/buatan (sungai, jalan, parit, dan lain-lain) dan bangunan-bangunan penting (kantor desa, sekolah, pasar, rumah sakit, dan lain-lain) yang ada di sketsa peta WA BPS rujukan ke tempat yang bersesuaian di salinan sketsa peta desa/SLS.

5. Dengan membawa peta dasar serta salinan sketsa peta di kertas *doorslag*, lakukan kunjungan lapangan untuk hal-hal berikut:

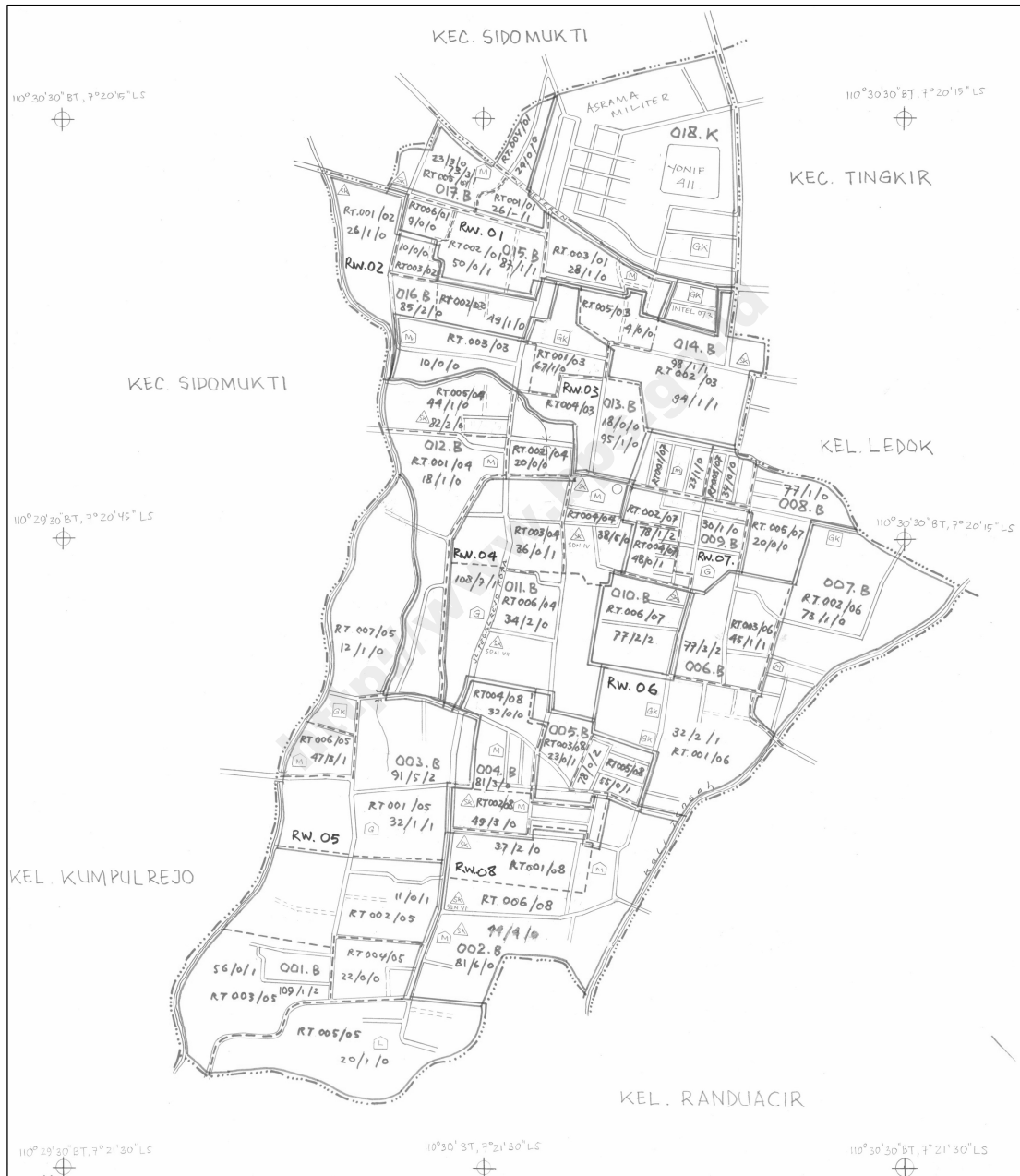
- a. Mengunjungi ketua SLS untuk mendapatkan informasi nama ketua, serta batas dan muatan (jumlah KK, BSBTT, dan BSTT kosong) SLS Tingkat I. Jika muatan SLS Tingkat I besar, cari informasi muatan per segmen.
- b. Tuliskan nama ketua SLS Tingkat I dan rincian muatan SLS Tingkat I pada salinan sketsa peta.

Penulisan rincian muatan adalah: [jumlah KK]/[jumlah BSBTT]/[jumlah BSTT kosong]. Misalnya di suatu RT terdapat 80 KK, 10 BSBTT dan 0 BSTT kosong, maka penulisan muatan adalah: 80/10/0.

- c. Lakukan pengecekan lapangan. Tambahkan unsur-unsur alam/buatan dan bangunan-bangunan penting yang belum ada, dan hapus yang sudah tidak ada, di salinan sketsa peta desa dan SLS.
- d. Tambahkan simbol kotak kecil (\square) dan keterangannya yang digunakan sebagai tanda untuk batas SLS yang tidak jelas. Misalnya batas SLS adalah gang kecil tanpa nama dan di ujung gang tersebut terdapat rumah Pak Hadi, maka gambarkan kotak kecil dan tuliskan "Hadi".

Petugas pemeta Desa wajib melakukan kunjungan ke desa yang menjadi wilayah tugasnya agar peta yang dibuat sesuai dengan kondisi terkini.

Contoh salinan sketsa peta pada kertas doorslag yang akan disalin/diperbesar ke blangko SP2010-WA dan SP2010-WB dapat dilihat pada Gambar 4.6.

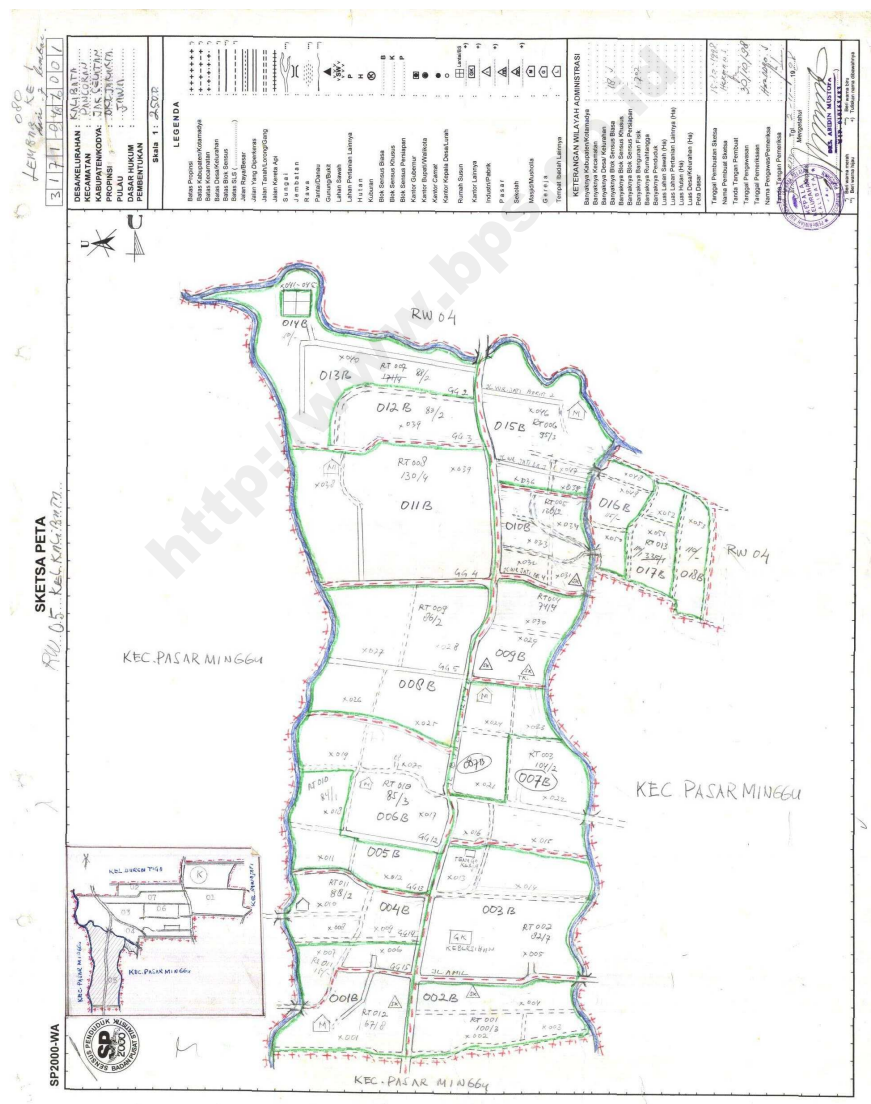


Gambar 4.6. Contoh salinan sketsa peta desa dalam kertas *doorslag*

B. Persiapan Penggambaran Sketsa Peta Desa dan Blok Sensus dengan Menggunakan Peta Dasar berupa Sketsa Peta WA BPS atau Peta Lainnya yang Tidak Memiliki Koordinat Bumi

Tahap-tahap yang dilakukan dalam persiapan penggambaran sketsa peta desa dengan menggunakan peta dasar berupa sketsa peta WA BPS atau peta lainnya yang memiliki koordinat bumi adalah sebagai berikut.

1. Pemeta desa menerima peta dasar berupa sketsa peta WA BPS (Sketsa Peta SE2006-WA/ST2003WA/SP2000-WA) atau peta lainnya yang tidak memiliki koordinat bumi. Contoh sketsa peta WA yang dijadikan peta dasar dapat dilihat pada Gambar 4.7. berikut.



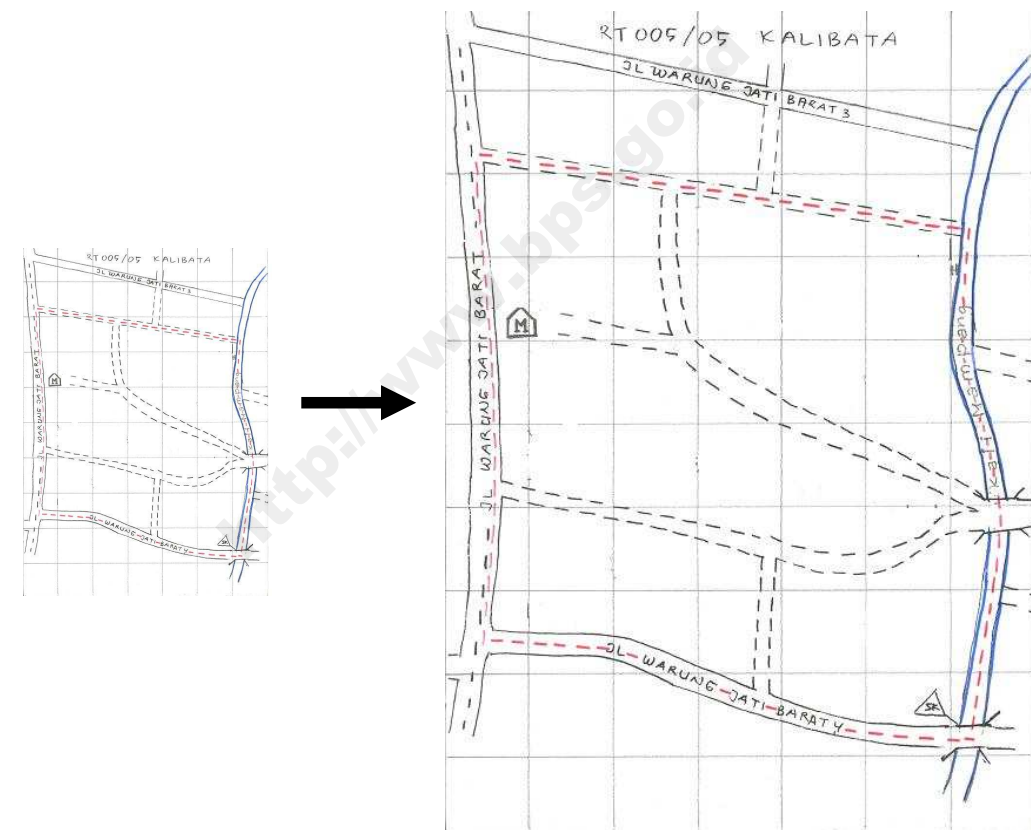
Gambar 4.7. Contoh sketsa peta WA sebagai peta dasar

2. Jiplak sketsa peta desa lengkap dengan unsur-unsur penting di dalamnya (sungai, jalan, parit, kantor desa, sekolah, pasar, rumah sakit, dan lain-lain) ke kertas *doorslag* ukuran A1. Dengan demikian diperoleh salinan sketsa peta desa.

Jika ada SLS yang wilayahnya dianggap terlalu kecil untuk menggambarkan batas-batas segmen di dalamnya, atau diketahui sebagai daerah padat sehingga diperkirakan harus dibagi menjadi beberapa BS, lakukan perbesaran gambar SLS tersebut pada kertas *doorslag* yang lain (ukuran A3). Dengan demikian diperoleh salinan sketsa peta SLS yang nantinya akan digunakan sebagai alat bantu pada saat penggambaran sketsa peta BS di blangko SP2010-WB.

Contoh:

Di RT005 pada sketsa peta di Gambar 4.8. diketahui merupakan daerah padat sehingga diperkirakan RT tersebut akan terbagi menjadi 3 BS. Maka dilakukan perbesaran sketsa peta untuk wilayah RT tersebut.



Gambar 4.8. Contoh salinan sketsa peta SLS hasil perbesaran 2 kali

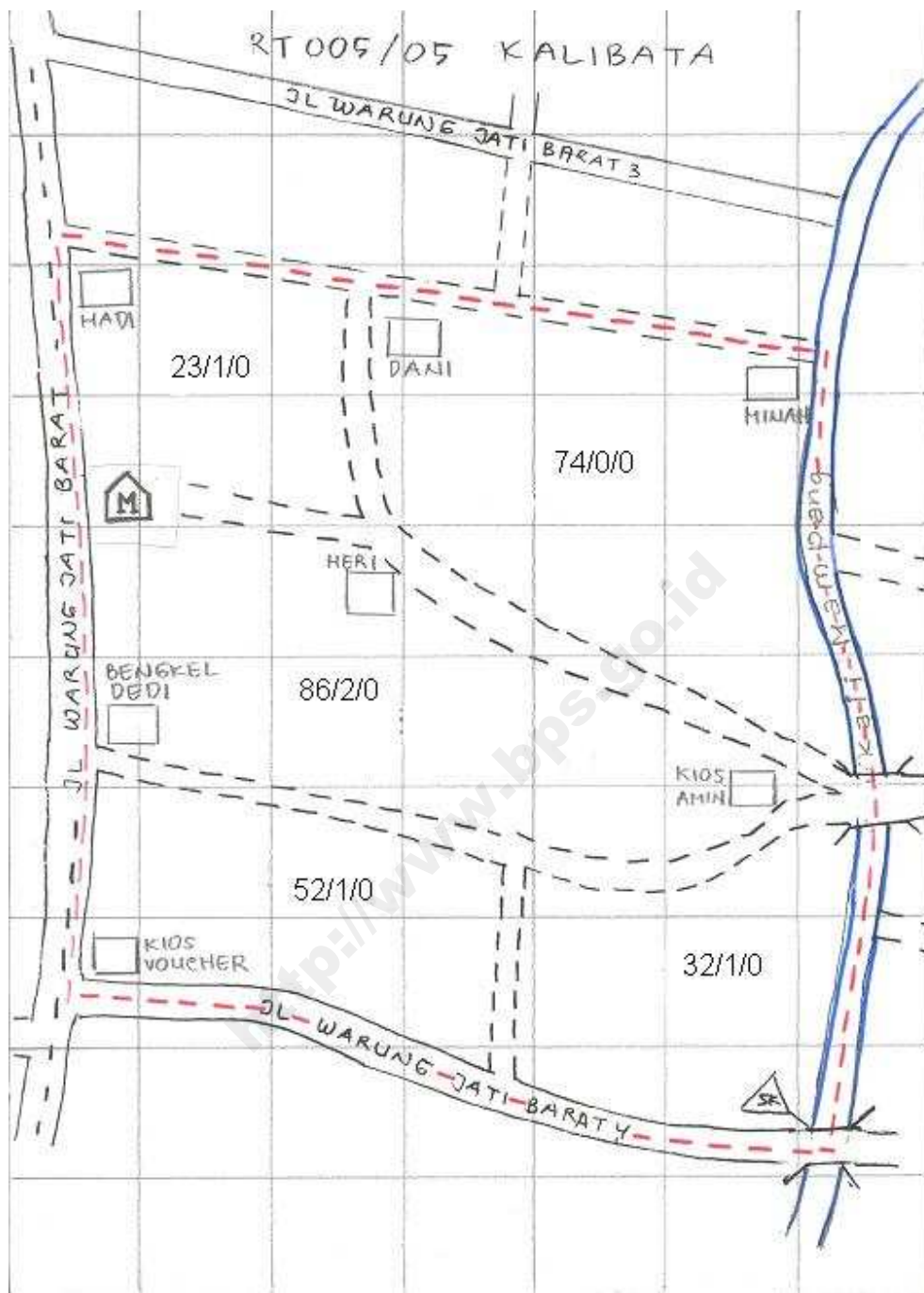
3. Dengan membawa salinan sketsa peta desa di kertas *doorslag*, kunjungi kantor desa untuk mendapat informasi batas desa yang benar, keberadaan dan hirarki SLS, serta informasi awal batas-batas SLS Tingkat I dan II beserta namanya. Gambarkan batas-batas SLS dan tuliskan nama SLS pada salinan sketsa peta desa.

4. Dengan membawa salinan sketsa peta desa dan SLS di kertas *doorslag*, lakukan kunjungan lapangan untuk hal-hal berikut:
- Lakukan penelusuran batas desa untuk mengenali wilayah kerja.
 - Mengunjungi ketua SLS untuk mendapatkan informasi nama ketua, serta batas dan muatan (jumlah KK, BSBTT, dan BSTT kosong) SLS Tingkat I. Jika muatan SLS Tingkat I besar, cari informasi muatan per segmen.
 - Tuliskan nama ketua SLS Tingkat I dan rincian muatan SLS Tingkat I pada salinan sketsa peta.

<p>Penulisan rincian muatan adalah: [jumlah KK]/[jumlah BSBTT]/[jumlah BSTT kosong]. Misalnya di suatu RT terdapat 80 KK, 10 BSBTT dan 0 BSTT kosong, maka penulisan muatan adalah: 80/10/0.</p>
--

- Lakukan pengecekan lapangan. Tambahkan unsur-unsur alam/buatan dan bangunan-bangunan penting yang belum ada, dan hapus yang sudah tidak ada, di salinan sketsa peta desa dan SLS.
- Tambahkan simbol kotak kecil (□) dan keterangannya yang digunakan sebagai tanda untuk batas SLS yang tidak jelas. Misalnya batas SLS adalah gang kecil tanpa nama dan di ujung gang tersebut terdapat rumah Pak Hadi, maka gambarkan kotak kecil dan tuliskan "Hadi".

Gambar 4.9. adalah contoh salinan sketsa peta SLS yang muatannya banyak sehingga informasi muatan per segmen harus diperoleh untuk membagi SLS menjadi beberapa BS.



Gambar 4.9. Contoh salinan sketsa peta SLS yang muatannya banyak

Petugas pemeta wajib melakukan kunjungan ke desa yang menjadi wilayah tugasnya agar peta yang dibuat sesuai dengan kondisi terkini.

4.5.2 Pembentukan Blok Sensus

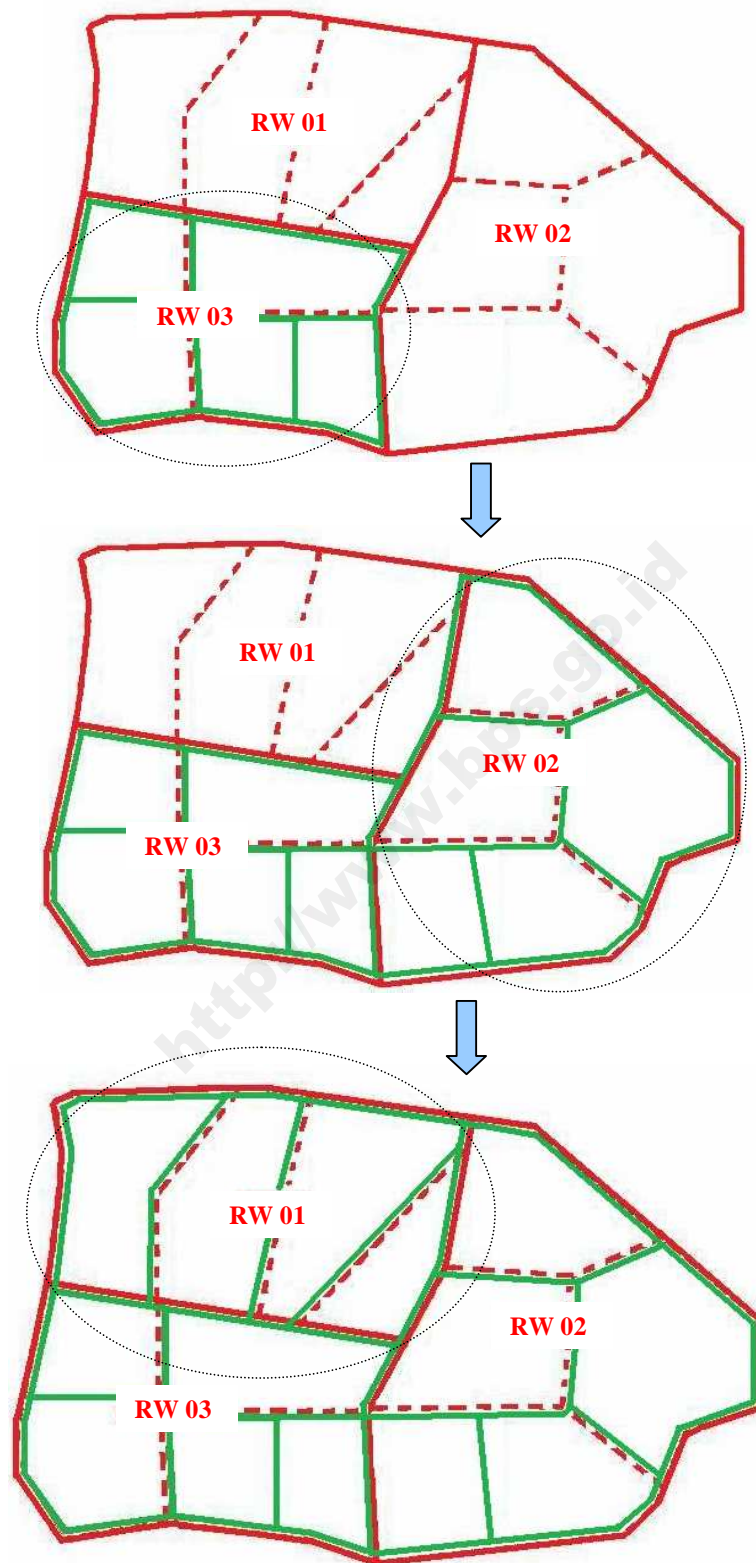
Tahapan pembentukan BS adalah sebagai berikut:

1. Siapkan salinan sketsa peta desa yang di dalamnya sudah terdapat batas-batas SLS beserta muatannya.
2. Mulailah pembentukan BS dari wilayah di ujung barat daya. Jika ada SLS Tingkat II (misalnya RW), maka pembentukan BS dilakukan dalam satu SLS tingkat II yang pertama, dilanjutkan dengan SLS Tingkat II berikutnya secara berurutan sampai habis dalam satu desa.

Contoh:

Suatu desa terdiri dari 3 RW (sebagai SLS Tingkat II). Pemeta desa terlebih dahulu membentuk BS di dalam RW 03 yang terletak di ujung barat daya, setelah selesai dilanjutkan dengan pembentukan BS di RW 02 dan RW 01 (lihat Gambar 4.10.).

3. Bentuklah BS berdasarkan SLS sesuai dengan syarat pembentukan BS, yaitu:
 - a. Membagi habis desa menjadi beberapa blok sensus.
 - b. Dengan mempertimbangkan muatan dan batas jelas, pembentukan BS dapat dilakukan seperti berikut:
 - Satu BS terdiri dari satu SLS utuh jika muatan SLS sekitar 80 – 120.
 - Satu BS merupakan bagian dari suatu SLS apabila muatan SLS lebih dari 150. Batas BS yang membagi SLS tersebut harus merupakan batas yang jelas dan mudah dikenali, baik batas alam maupun buatan.
 - Satu BS merupakan gabungan dari beberapa SLS utuh jika muatan masing-masing SLS relatif sedikit.
 - Jika di suatu wilayah tidak terdapat SLS, maka batas BS harus merupakan batas yang jelas dan mudah dikenali, baik batas alam maupun buatan.
 - c. Satu BS harus terletak pada satu hamparan, tidak boleh terpisah oleh BS lain.
4. Gambarkan batas BS pada salinan sketsa peta desa dan SLS.



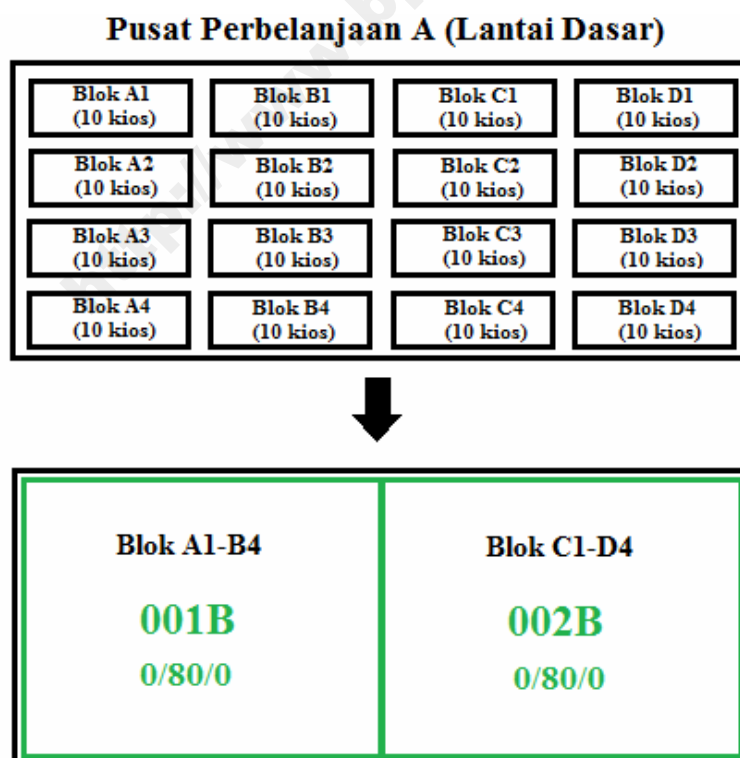
Gambar 4.10. Contoh Urutan Pembentukan BS

A. Pembentukan Blok Sensus untuk Bangunan Bertingkat Banyak

Bangunan bertingkat banyak sering ditemui di daerah perkotaan, contohnya rumah susun, apartemen, pusat perbelanjaan (*mall*), gedung perkantoran, dan lain-lain. Tahapan pembentukan BS untuk bangunan bertingkat banyak adalah sebagai berikut:

1. Mulailah pembentukan BS dimulai dari lantai paling bawah.
2. Dengan mempertimbangkan muatan tiap lantai, pembentukan BS dapat dilakukan seperti berikut:
 - a. Apabila terdapat beberapa lantai dimana jumlah muatan tiap lantai sekitar 80 – 120, maka tiap lantai dapat dibentuk menjadi 1 (satu) BS.
 - b. Apabila dalam satu lantai jumlah muatannya lebih dari 150, maka dalam satu lantai dapat dibentuk menjadi 2 BS.

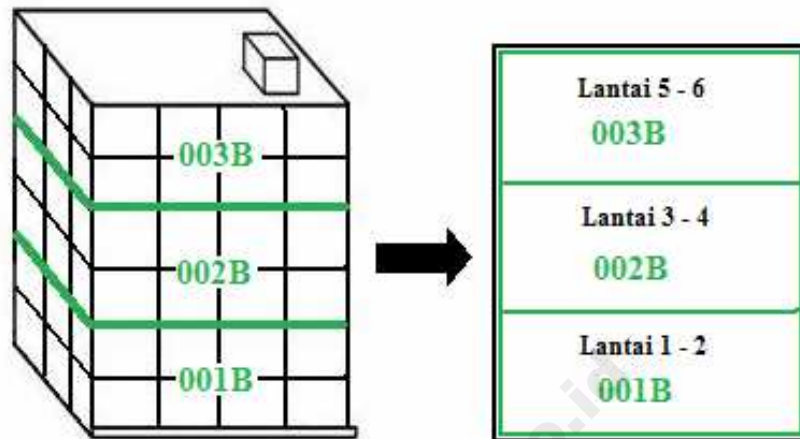
Pada Gambar 4.11., pusat perbelanjaan A lantai dasar memiliki muatan 160 kios. Karena jumlah muatannya lebih dari 150, maka lantai dasar dibagi menjadi 2 BS, yaitu 001B dan 002B.



Gambar 4.11. Contoh 2 BS dalam 1 lantai

- c. Apabila dalam satu lantai jumlah muatannya relatif sedikit, maka beberapa lantai dibentuk menjadi 1 BS.

Gambar 4.12. menunjukkan apartemen yang terdiri dari 6 lantai dengan jumlah muatan 50 per lantai sehingga tiap 2 lantai dibentuk menjadi 1 BS.



Gambar 4.12. Contoh apartemen dengan 1 BS di 2 lantai

- d. Apabila terdapat sekumpulan bangunan bertingkat banyak yang jumlah muatannya relatif sedikit, maka beberapa bangunan dapat dibentuk menjadi 1 (satu) BS.

Gambar 4.13. merupakan contoh sketsa BS yang terdiri dari 3 bangunan rumah susun, dimana tiap bangunan rumah susun memiliki jumlah muatan 30 KK.

SP2010-WB SKETSA PETA BLOK SENSUS.....007B.....

Kode Wilayah Administrasi 3 6 0 1 0 8 0 1 0 0 Kode Blok Sensus 0 0 7 B

NO. BLOK SENSUS : 007B
 NAMA SLS TINGKAT I : RT 007B/02
 DESA/KELURAHAN : 007B
 KECAMATAN : 007B
 KABUPATEN/KOTA : 007B
 PROPINSI : 007B

Skala 1 : 1000

LEGENDA

Batas Propinsi :
 Batas Kabupaten/Kotamadya :
 Batas Kecamatan :
 Batas Desa/Kelurahan :
 Batas Blok Sensus :
 Batas SLS Tingkat II :
 Batas SLS Tingkat I :
 Jalan Raya/Besar :
 Jalan Yang Diperkeras :
 Jalan Tanah/Lorong/Gang :
 Jalan Keras Api :
 Sungai :
 Jembatan :
 Kawah :
 Pantai/Danau :
 Gunung/Bukit :
 Lahan Sawah :
 Kuburan :
 Bangunan Tempat Tinggal :
 Bangunan Campuran :
 Bangunan Tempat Usaha :
 Bangunan Lainnya :
 Industri/Pabrik :
 Pasar :
 Sekolah :
 Masjid :
 Gereja :
 Pura :
 Tempat Ibadah Lainnya :

KETERANGAN BLOK SENSUS

Klasifikasi Perumahan yang Ditetapkan :
 1. Rumah 2. Apartemen 3. Mewah/Kompleks 4. Lainnya :
 Klasifikasi Bangunan yang Ditetapkan :
 1. Apartemen/Kompleks/Kondominium 2. Perumahan/Perumahan 3. Lainnya :
 Bangunan yang Ditetapkan :
 Bangunan Campuran :
 Bangunan Tempat Usaha :
 Bangunan Lainnya :

Tanggal Pengisian :
 Nama Pengisi :
 Tanda Tangan :
 Nama Pengisi :
 Tanda Tangan :

*) Batas sesuai rencana
 **) Batas sesuai fakta
 +) Tidak sesuai rencana
 **) Tidak sesuai fakta

Blok A

Lantai 3	10/0/0
Lantai 2	10/0/0
Lantai 1	10/0/0

Blok B

Lantai 3	10/0/0
Lantai 2	10/0/0
Lantai 1	10/0/0

Blok C

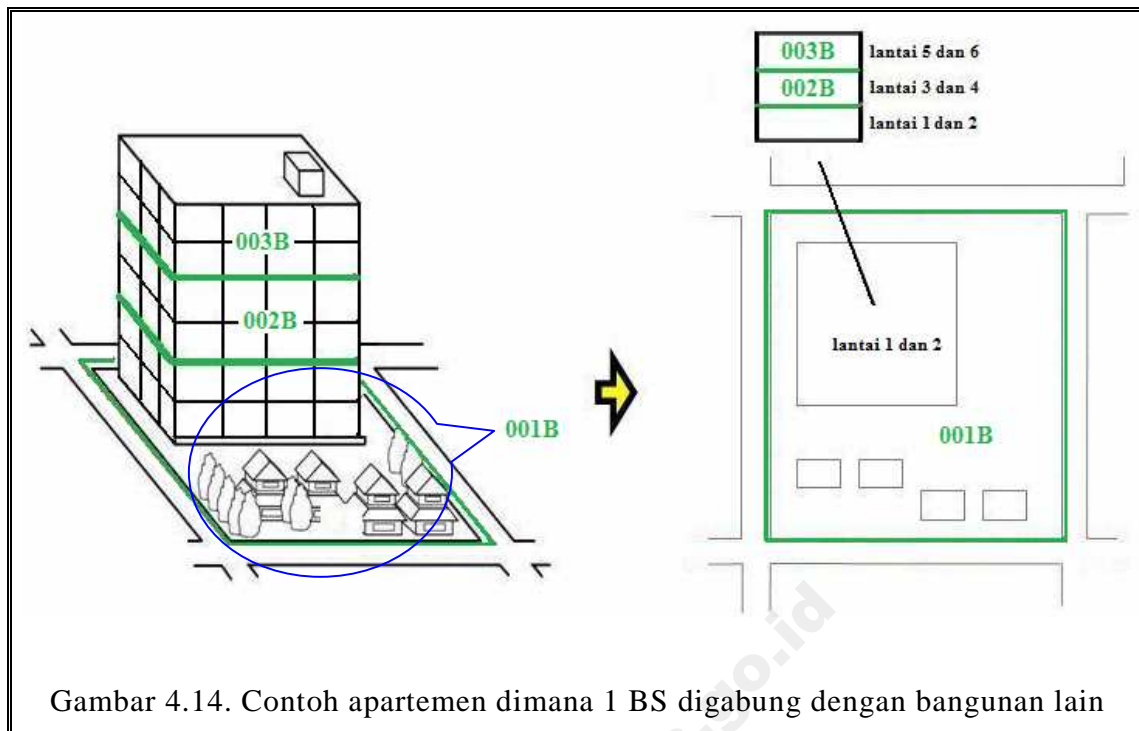
Lantai 3	10/0/0
Lantai 2	10/0/0
Lantai 1	10/0/0

Badan Pusat Statistik

Gambar 4.13. Contoh sekelompok rumah susun yang dibentuk menjadi satu BS

Jika di suatu SLS terdapat bangunan rumah biasa dan bangunan bertingkat banyak, maka pembentukan BS dapat dilakukan dengan cara menggabungkan bangunan rumah biasa dengan apartemen, atau masing-masing dibentuk menjadi BS tersendiri (tergantung kondisinya dan disesuaikan dengan konsep).

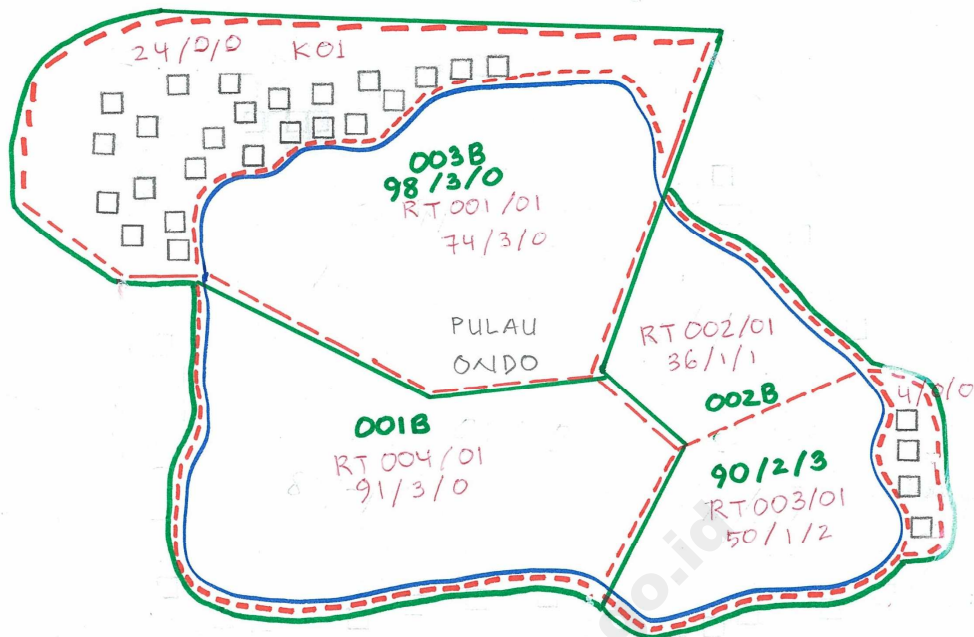
Gambar 4.14. menunjukkan ada beberapa bangunan toko yang terletak di area sebuah apartemen dalam 1 RT. Apartemen tersebut mempunyai 6 lantai dengan jumlah muatan per lantai 50, sehingga tiap 2 lantai dibentuk menjadi 1 BS. Karena bangunan toko hanya sedikit, maka digabungkan dengan BS di apartemen lantai 1 dan 2 (001B).



B. Pembentukan Blok Sensus untuk Pemukiman di Atas Air

Di daerah pinggir laut/danau/sungai yang banyak terdapat pemukiman di atas air, pembentukan BS tetap mengacu pada syarat pembentukan. Apabila pemukiman di atas air tersebut tidak masuk wilayah desa mana pun dan tidak terdapat dalam peta dasar, maka pemukiman tersebut harus dimasukkan sebagai bagian dari desa terdekat.

Untuk pemukiman di atas air yang tidak masuk SLS mana pun dan muatannya relatif sedikit, maka pemukiman tersebut dimasukkan ke SLS terdekat. Tetapi jika muatannya cukup besar, bisa dibentuk menjadi satu SLS khusus. Contohnya dapat dilihat pada Gambar 4.15.

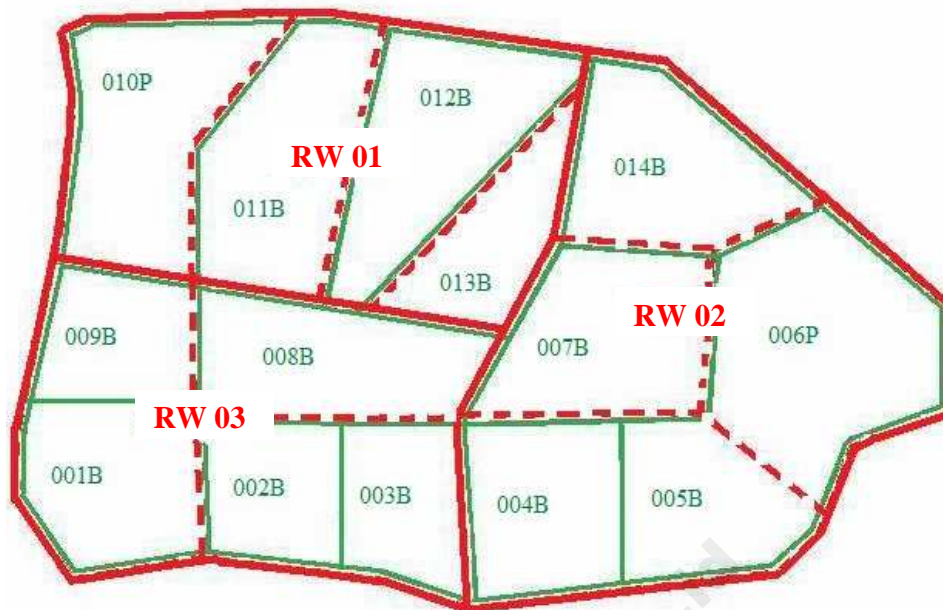


Gambar 4.15. Contoh pembentukan blok sensus untuk pemukiman di atas air

4.5.3 Penomoran Blok Sensus

Setelah BS dibentuk dan batas-batasnya digambarkan pada salinan sketsa peta desa dan SLS, lakukan penomoran BS dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kode BS terdiri dari 3 angka dan 1 huruf. Tiga angka menunjukkan nomor urut BS pada suatu desa, dan satu huruf menunjukkan jenis BS. Huruf B menunjukkan BS Biasa, K menunjukkan BS Khusus, dan P menunjukkan BS Persiapan.
2. Penomoran dimulai dari BS yang berada di posisi barat daya, kemudian dilanjutkan dengan BS yang berada di sebelah timurnya, demikian seterusnya sampai pada BS yang berada di ujung timur. Penomoran kemudian dilanjutkan ke arah barat. Setelah sampai pada BS paling barat, kembali berbelok ke arah timur. Demikian seterusnya sampai habis pada desa yang bersangkutan. Contoh penomoran dapat dilihat pada Gambar 4.16.



Gambar 4.16. Contoh penomoran blok sensus

4.5.4 Penggambaran Sketsa Peta Desa pada Blangko SP2010-WA

Tahap-tahap penggambaran sketsa peta desa pada blangko SP2010-WA adalah sebagai berikut:

1. Siapkan salinan sketsa peta desa (*doorslag* ukuran A1).
2. Salin sketsa peta desa, lengkap dengan unsur-unsur penting di dalamnya, dari kertas *doorslag* ke blangko SP2010-WA. Kemudian lakukan hal-hal berikut:
 - a. Gambarkan batas wilayah administrasi dan SLS dengan warna merah, sedangkan sungai, rawa, batas danau dan laut, digambarkan dengan warna biru (sesuai dengan legenda).
 - b. Tuliskan nama/nomor SLS dan rincian muatannya dengan warna merah.
 - c. Tuliskan rincian muatan BS dengan spidol warna hijau jika:
 - BS terdiri dari 2 SLS atau lebih.
 - BS merupakan bagian dari SLS yang muatannya besar sehingga SLS tersebut harus dibagi menjadi beberapa BS.

3. Lengkapi isian pada blangko SP2010-WA, yaitu judul, kode desa, keterangan mengenai lokasi dan dasar hukum pembentukan desa, skala peta, keterangan wilayah administrasi, tanggal pembuatan peta, serta nama dan tanda tangan pembuat peta.
4. Buat sketsa peta desa SP2010-WA sebanyak 2 lembar (1 untuk BPS Pusat dan 1 untuk BPS Kabupaten/Kota).
5. Serahkan kedua lembar sketsa peta desa SP2010-WA kepada pengawas/pemeriksa untuk diperiksa dan dilengkapi dengan tanggal pengawasan/pemeriksaan peta, serta nama dan tanda tangan pengawas/pemeriksa.

Contoh sketsa peta desa SP2010-WA yang telah dibuat sampai dengan tahap ini dapat dilihat pada Gambar 4.18.

6. Datangi kantor desa untuk meminta pengesahan sketsa peta desa SP2010-WA kepada kepala desa.
7. Serahkan kedua lembar sketsa peta desa SP2010-WA kepada pengawas/pemeriksa untuk diperiksa dan dilengkapi dengan tanggal pengawasan/pemeriksaan peta, serta nama dan tanda tangan pengawas/pemeriksa.
8. Isi daftar SP2010-RD sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan.

4.5.5 Penggambaran Sketsa Peta Blok Sensus pada Blangko SP2010-WB

Sketsa peta BS yang digambarkan pada blangko SP2010-WB hanya untuk BS Biasa dan BS Khusus, sedangkan BS Persiapan tidak digambarkan.

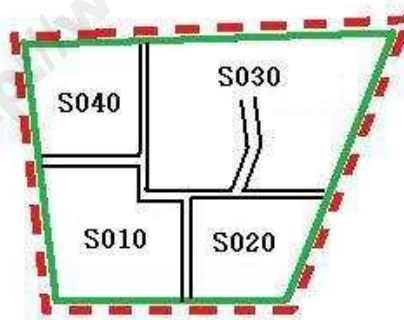
Tahapan penggambaran sketsa peta BS adalah sebagai berikut:

1. Siapkan sketsa peta SP2010-WA yang di dalamnya sudah terdapat batas-batas SLS dan BS, beserta muatan SLS/BS.

SLS yang wilayahnya dianggap terlalu kecil untuk menggambarkan batas-batas segmen di dalamnya, pada tahap persiapan telah dilakukan pembesaran sketsa peta SLS di kertas *doorslag* ukuran A3 (disebut salinan sketsa peta SLS). Siapkan juga salinan sketsa peta SLS ini.

2. Salin/perbesar wilayah BS pada sketsa peta desa SP2010-WA lengkap dengan unsur-unsur penting di dalamnya ke sketsa peta BS SP2010-WB. Kemudian lakukan hal-hal berikut:

- a. Gambarkan batas wilayah administrasi dan SLS dengan warna merah, sedangkan sungai, rawa, batas danau dan laut, digambarkan dengan warna biru (sesuai dengan legenda).
 - b. Tuliskan nama/nomor SLS dan rincian muatannya dengan warna merah.
 - c. Tuliskan rincian muatan BS dengan warna hijau.
3. Lakukan penomoran segmen dengan ketentuan seperti berikut:
 - a. Pemberian nomor segmen hanya dilakukan pada sketsa peta BS SP2010-WB.
 - b. Nomor segmen terdiri dari huruf S dan 3 angka, di mana digit pertama dan kedua merupakan nomor urut segmen pada suatu blok sensus, dan digit ketiga adalah 0 (nol). Penulisan nomor segmen adalah S010, S020, S030, dan seterusnya.
 - c. Penomoran dimulai dari segmen yang berada di posisi barat daya, kemudian dilanjutkan dengan segmen yang berada di sebelah timurnya, demikian seterusnya sampai pada segmen yang berada di ujung timur. Penomoran kemudian dilanjutkan ke arah barat. Setelah sampai pada segmen paling barat, kembali berbelok ke arah timur. Demikian seterusnya sampai habis pada BS yang bersangkutan. Contoh penomoran dapat dilihat pada Gambar 4.17.



Gambar 4.17. Contoh penomoran segmen dalam suatu BS

4. Lengkapi isian pada blangko SP2010-WB, yaitu judul, kode desa dan nomor BS, keterangan mengenai lokasi BS, skala peta, keterangan BS, tanggal pembuatan peta, serta nama dan tanda tangan pembuat peta.
5. Serahkan sketsa peta BS SP2010-WB kepada pengawas/pemeriksa untuk diperiksa dan dilengkapi dengan tanggal pengawasan/pemeriksaan peta, serta nama dan tanda tangan pengawas/pemeriksa. Contoh sketsa peta BS SP2010-WB yang telah dibuat dapat dilihat pada Gambar 4.19.

SP2010-WA



110° 29' 30" BT, 7° 21' 30" LS

110° 30' BT, 7° 21' 30" LS

110° 30' 30" BT, 7° 21' 30" LS

SKETSA PETA TEGAL REJO



Kode Wilayah Administrasi

3 3 7 3 0 1 1 0 0 5

DESA/KEL/NAGARI : TEGAL REJO
KECAMATAN : ARGOMULYO
KAB/KOTA/KODYA : SALATIGA
PROPINSI : JAWA TENGAH
PULAU :
DASAR HUKUM : P.P. No.69 TH.1992
PEMBENTUKAN :

Skala 1 : 5.000

LEGENDA

Batas Propinsi	---
Batas Kabupaten/Kotamadya	---
Batas Kecamatan	---
Batas Desa/Kelurahan	---
Batas Blok Sensus	---
Batas SLS Tingkat II	---
Batas SLS Tingkat I	---
Jalan Raya/Besar	==
Jalan Yang Diperkeras	==
Jalan Tanah/Lorong/Gang	---
Jalan Kereta Api	---
Sungai	~
Jembatan	---
Rawa	---
Pantai/Danau	---
Gunung/Bukit	▲
Lahan Sawah	▨
Kuburan	⊕
Kantor Gubernur	⬢
Kantor Bupati Desa/Walikota	⬢
Kantor Camat	⬢
Kantor Kepala Desa/Lurah	⬢
Rumah Susun	⬢
Kantor Lainnya	⬢
Industri/Pabrik	⬢
Pasar	⬢
Sekolah	⬢
Masjid	⬢
Gereja	⬢
Pura	⬢
Tempat Ibadah Lainnya	⬢

KETERANGAN WILAYAH ADMINISTRASI

Banyaknya Desa/Kelurahan	8
Banyaknya SLS Tingkat II	42
Banyaknya SLS Tingkat I	12
Banyaknya Blok Sensus Biasa	1
Banyaknya Blok Sensus Khusus	1
Banyaknya Blok Sensus Persiapan	1373
Banyaknya Rumah tangga	1373
Sumber Peta Dasar	CITRA SATELIT

Tanggal Pembuatan Sketsa	22 OKTOBER 2008
Nama Pembuat Sketsa	UMAR SYAIBANI
Tanda Tangan	Umar Syabani
Tanggal Pengawasan/	30-10-2008
Pemeriksaan	Marjanta
Nama Pengawas/Pemeriksa	Marjanta
Tanda Tangan	Marjanta

..... Tgl.
kepala Mengetahui
.....
*) Beri warna merah
**) Beri warna hijau
***) Beri warna biru
+) Tuliskan nama dibawahnya

Badan Pusat Statistik

Gambar 4.18. Sketsa Peta Desa SP2010-WA

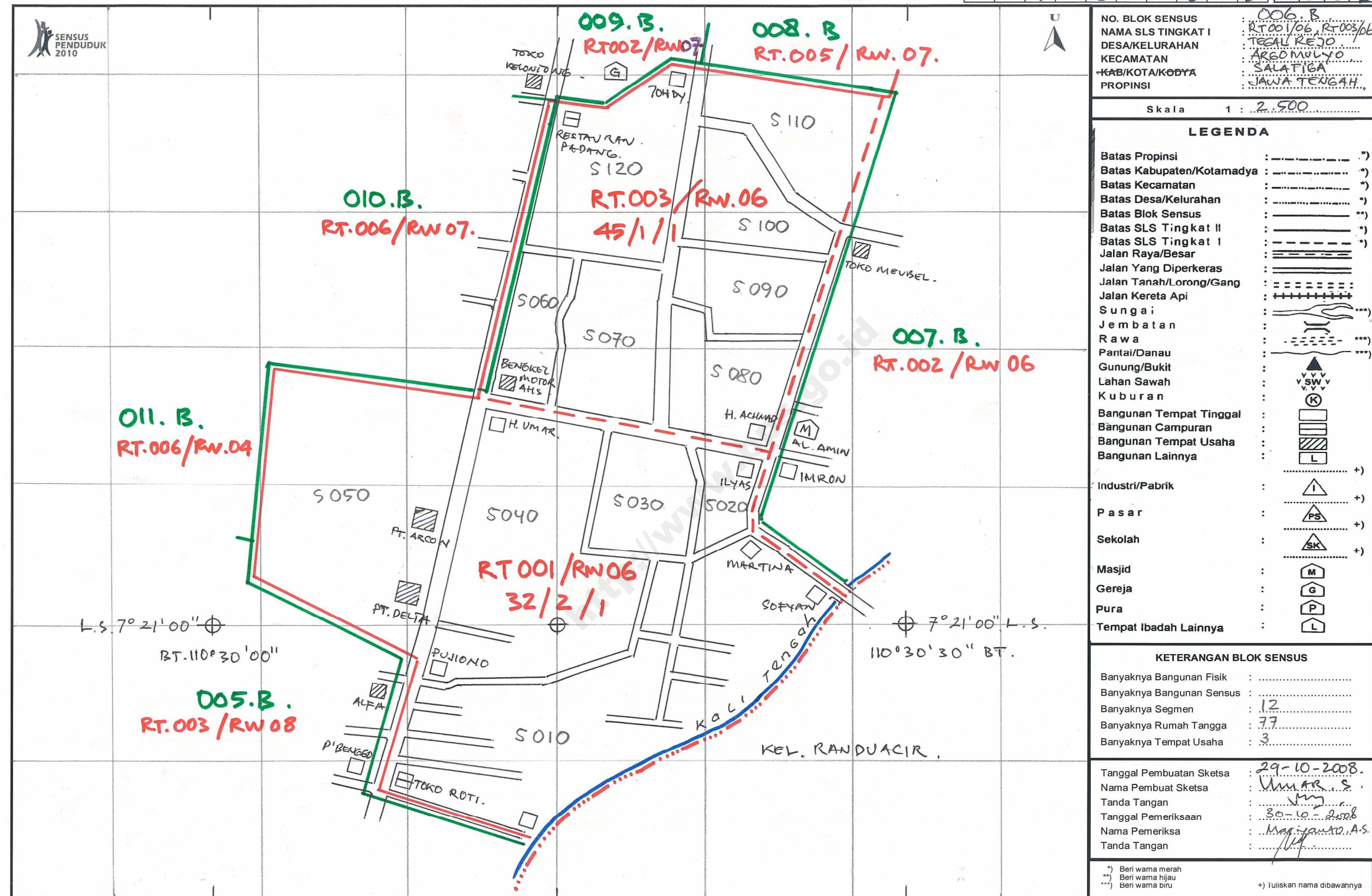
SP2010-WB

SKETSA PETA BLOK SENSUS... 006.B...

Kode Wilayah Administrasi

Kode Blok Sensus

3373011005006B



Badan Pusat Statistik

Gambar 4.19. Contoh sketsa peta BS SP2010-WB

CONTOH KASUS

1. Di suatu desa ada satu RT yang wilayahnya terbagi di dua lokasi yang terpisah (tidak sehamparan).

Perlakuan: Pembentukan BS tetap mempertahankan sehamparan. Karena wilayah RT tersebut berada di dua lokasi yang terpisah, maka masing-masing lokasi **dianggap** sebagai RT tersendiri. Jika muatannya sedikit, dapat digabungkan dengan RT di sebelahnya untuk membentuk satu BS.

2. Di suatu desa ada wilayah yang tidak masuk ke SLS mana pun.

Perlakuan: Jika wilayahnya kecil, masukkan ke SLS terdekat. Tetapi jika wilayahnya cukup besar, bisa dibentuk menjadi satu SLS khusus dan diberi nama K01, K02, K03, dan seterusnya.

3. Ada satu keluarga yang tidak mau mengaku sebagai warga RT setempat, tetapi mengaku sebagai warga RT lain.

Perlakuan: Dalam kegiatan Pemetaan SP2010, pendekatannya adalah wilayah, oleh karena itu keluarga tersebut dimasukkan sebagai warga RT setempat.

4. Ada wilayah di perbatasan desa yang dipersengketakan oleh dua desa. Masing-masing desa mengaku wilayah itu sebagai wilayah desanya.

Perlakuan: Pemeta desa melakukan pembicaraan dengan kedua belah pihak untuk segera diambil sebuah keputusan mengenai batas desa. Tegaskan bahwa keputusan itu hanya untuk kepentingan pemetaan SP2010 dan pendataan SP2010.

<http://www.bps.go.id>

TATA CARA PENGISIAN DAFTAR REKAPITULASI DESA (SP2010-RD)

Daftar Rekapitulasi Desa (SP2010-RD) digunakan untuk mencatat rekapitulasi perkiraan jumlah muatan (keluarga), serta keterangan lainnya yang berkaitan dengan BS dan SLS untuk setiap desa/kelurahan. Pengisian daftar SP2010-RD dilakukan setelah pembuatan sketsa peta desa/kelurahan (SP2010-WA) selesai.

5.1 BLOK I. PENGENALAN TEMPAT

1. Rincian 1 - 4

Tuliskan nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, kemudian isikan kode wilayahnya pada kotak di kolom 2 (kode wilayah harus sama dengan kode dalam daftar nama desa wilayah tugas yang diberikan KSK).

Contoh :

BLOK I: PENGENALAN TEMPAT		
(1)		(2)
1. Provinsi	: Jawa Tengah	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="3"/>
2. Kabupaten/Kota *)	: Salatiga	<input type="text" value="7"/> <input type="text" value="3"/>
3. Kecamatan	: Argo Mulyo	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>
4. Desa/Kelurahan*)	: Tegal Rejo	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="5"/>

2. Rincian 5

Tuliskan alamat kantor desa/kelurahan secara lengkap dan jelas.

Contoh:

5. Alamat Kantor Desa/Kelurahan*)	: Jl. Magersari No. 6 RT 004 RW 04
-----------------------------------	------------------------------------

3. Rincian 6

Tuliskan dasar hukum pembentukan desa/kelurahan beserta nomor SK, kemudian isikan kodenya pada kotak (kolom 2). Lakukan pengecekan ulang untuk nomor SK tersebut kepada petugas desa/kelurahan.

Contoh:

6. Dasar Hukum	: Perda Bupati No.1/5 Tahun 2005	<input type="text" value="2"/> **)
----------------	----------------------------------	------------------------------------

Isian di kotak adalah angka 2.

4. Rincian 7

Lingkari kategori daerah desa/kelurahan. Kode 1 untuk perkotaan atau 2 untuk perdesaan, kemudian tuliskan kode yang dilingkari pada kotak di kolom 2 (kategori harus sama dengan daftar nama desa wilayah tugas yang diberikan KSK).

Contoh :

7. Daerah	:	Perkotaan	<u>1</u> Perdesaan	2	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div>
-----------	---	-----------	--------------------	---	--

5. Rincian 8 – 11

Rincian 8 – 11 diisi setelah seluruh keterangan untuk masing-masing BS di Blok III selesai diisi. Isian rincian 8 (Jumlah SLS Terkecil) diperoleh dari isian kolom 11 baris jumlah Blok III lembar terakhir. Isian rincian 9 (Jumlah Blok Sensus Biasa) diperoleh dari isian kolom 3 baris jumlah (kotak pertama) Blok III lembar terakhir. Isian rincian 10 (Jumlah Blok Sensus Persiapan) diperoleh dari isian kolom 3 baris jumlah (kotak kedua) Blok III lembar terakhir. Isian rincian 11 (Jumlah Blok Sensus Khusus) diperoleh dari isian kolom 3 baris jumlah (kotak ketiga) Blok III lembar terakhir.

Contoh :

8. Jumlah SLS Terkecil	:	13	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">3</div>
9. Jumlah Blok Sensus Biasa	:	15	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">5</div>
10. Jumlah Blok Sensus Khusus	:	0	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div>
11. Jumlah Blok Sensus Persiapan	:	1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div>

5.2 BLOK II. KETERANGAN PETUGAS

Rincian 1 - 3

Tuliskan nama petugas pemeta (rincian 1), tanggal pelaksanaan (rincian 2), dan tanda tangan (rincian 3) dari petugas pemeta di kolom 2 untuk rincian masing-masing. Tuliskan nama petugas pemeta (rincian 1), tanggal pelaksanaan (rincian 2), dan tanda tangan (rincian 3) dari pengawas / pemeriksa di kolom 3 untuk rincian masing-masing.

Contoh :

BLOK II: KETERANGAN PETUGAS		
URAIAN (1)	PEMETA (2)	PENGAWAS/PEMERIKSA (3)
1. Nama Petugas	Juniarto	Heri Minto
2. Tanggal Pelaksanaan	15-Apr-09	30-Apr-09
3. Tanda tangan

5.3. BLOK III. RINCIAN REKAP DESA

Blok III digunakan untuk mencatat semua keterangan yang berhubungan dengan masing-masing BS dalam setiap desa/kelurahan. Pada bagian kanan atas setiap lembar Blok III tertulis **“Halaman dari halaman”**, dimana pengisiannya dilakukan setelah seluruh pencatatan seluruh BS dalam satu desa/kelurahan selesai. Lembar pertama Blok III diberi nomor halaman 2. Jika dalam satu desa/kelurahan memerlukan dua halaman Blok III, maka penulisannya adalah **“Halaman 2 dari 3 halaman”** pada halaman pertama Blok III, dan **“Halaman 3 dari 3 halaman”** pada lembar berikutnya.

Pengisian kolom pada blok III sebagai berikut :

1. Kolom 1 (diisi setelah pengisian kolom 2 selesai untuk setiap halaman).

Isian kolom 1 digunakan untuk mencatat nomor urut dari setiap BS dalam satu desa/kelurahan. Tuliskan nomor urut dari setiap BS yang ada. Jika kode BS dalam suatu baris masih sama dengan kode BS di baris sebelumnya, maka nomor urut tidak perlu dituliskan (dikosongkan).

Contoh 1: Pada Tabel 6.1, BS 002 dan BS 005 ditulis berulang, karena masing-masing BS kan)tersebut terdiri dari beberapa RT. Penulisan nomor urut cukup satu kali pada BS yang paling atas.

No	Nomor Blok Sensus	Jenis Blok Sensus (B/K/P) ¹⁾		SLS Tingkat I (SLS Terkecil)
				Nama
(1)	(2)	(3)	...	(9)
1	001	B	...	001
2	002	B	...	003
	002	B	...	002
3	003	P	...	-
4	004	B	...	005
5	005	B	...	001
	005	B	...	002
6	006	B	...	004

Tabel 5.1. Contoh Pengisian kolom 1

2. Kolom 2

Tuliskan kode BS secara berurutan. Jika dalam 1 BS terdapat lebih dari 1 SLS tingkat I, maka nomor BS ditulis berulang.

Contoh: lihat Tabel 5.1.

3. Kolom 3

Tuliskan jenis BS, yaitu B untuk BS biasa, K untuk BS khusus dan P untuk BS persiapan.

4. Kolom 4 – 6.

Isian kolom 4, kolom 5, dan kolom 6 digunakan untuk mencatat muatan dari setiap BS. Tuliskan jumlah keluarga (KK) pada kolom 4 dan jumlah BSBTT dan BSTT kosong pada kolom 5. Jumlahkan isian kolom 4 dan kolom 5, dan tuliskan hasil penjumlahannya di kolom 6. Jika BS ditulis berulang, maka jumlah muatan cukup dituliskan satu kali.

Contoh pengisian kolom 4, 5 dan 6:

No	Nomor Blok Sensus	Jenis Blok Sensus (B/K/P) ¹⁾	Jumlah Muatan Blok Sensus		
			Jumlah Keluarga (KK)	Jumlah BSBTT/ BSTT Kosong	Jumlah Kol (4) + Kol(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	001	B	90	0	90
2	002	B	80	20	100
3	003	B	10	100	110
11	011	B	70	0	70
12	012	B	90	0	90
	012	B			
13	013	P			
14	014	B	110	0	110
15	015	B	110	0	110
	015	B			

Tabel 5.2. Contoh Pengisian kolom 4, 5 dan 6

5. Kolom 7

Tuliskan kode Kriteria Muatan Dominan di Blok Sensus yang bersangkutan.

Kode Kriteria Muatan Dominan antara lain:

1. Pemukiman Biasa (termasuk Rumah Susun)
2. Pemukiman Mewah (Kondominium/Apartemen)
3. Pemukiman Kumuh
4. Barak/Asrama/Pondok Pesantren
5. Kawasan Industri
6. Pertokoan/Pasar/Perkantoran (termasuk kampus/sekolah)

7. Hotel/Tempat Rekreasi
8. Persiapan/Kosong (termasuk hutan /Pesawahan)

6. Kolom 8

Tuliskan kode Kriteria Bangunan yang Dominan di Blok Sensus yang bersangkutan.

Kode Kriteria Bangunan yang Dominan antara lain:

1. Apartemen/kondominium/Flat
2. Pertokoan/Perkantoran
3. Lainnya

7. Kolom 9, 14, 15, dan 16

Tuliskan nama SLS tingkat I (kolom 9), SLS tingkat II (kolom 14), SLS tingkat III (kolom 15) dan SLS tingkat IV (kolom 16) untuk tiap Blok Sensus.

Misal: SLS tingkat I adalah RT 001. Maka nama SLS tingkat I yang ditulis adalah 001.

Jika ada wilayah yang tidak masuk ke dalam SLS manapun maka wilayah itu dianggap SLS khusus dan nama SLS pada kolom (10) diisi sebagai K01, K02, dst.

8. Kotak kode SLS (pada kolom 10, 14, 15 dan 16)

Isikan kode SLS (tingkat I, tingkat II, tingkat III, dan tingkat IV) yang ada di desa/kelurahan pada masing-masing kotak kode SLS.

Misal:

Bila SLS tingkat I adalah RT, maka kotak kode SLS diisi dengan angka 1. Bila SLS tingkat II adalah RW, maka kotak kode SLS diisi dengan angka 2.

9. Kolom 10

Tuliskan nama ketua SLS tingkat I.

Contoh 2:

Untuk pengisian kolom 9, 10, 14, 15 dan 16, bila di lapangan diketahui RT 01 sebagai SLS tingkat I diketuai oleh Pak Joko, RW 01 sebagai SLS tingkat II, Lingkungan Kertajaya sebagai SLS tingkat III, maka penulisan di SP2010-RD:

SLS Tingkat I (SLS Terkecil)		Kode ^{B)} 1	Tanda SLS (1/0) ^{B)}	SLS Tingkat II	Kode ^{B)} 2	SLS Tingkat III	Kode ^{B)} 5	SLS Tingkat IV	Kode ^{B)} -
Nama	Nama Ketua			Nama		Nama		Nama	
(9)	(10)		(11)	(14)		(15)		(16)	
001	Joko		...	01		Kertajaya		-	

Tabel 5.3. Contoh pengisian kolom 9, 10, 14, 15 dan 16

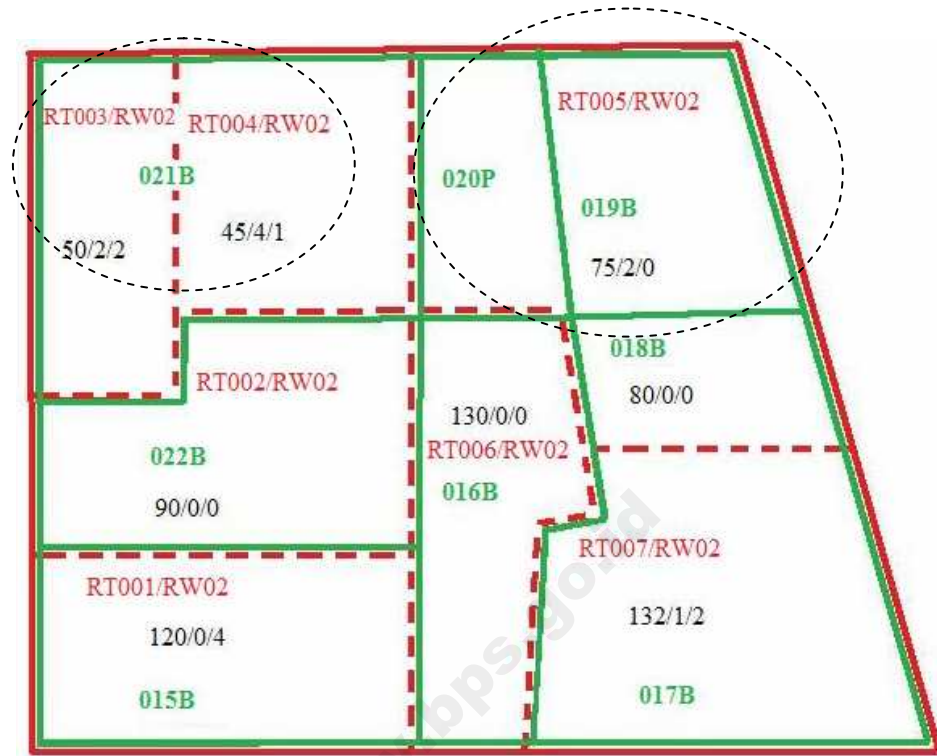
10. Kolom 11

Isikan kode 1 untuk tiap blok sensus sebagai tanda untuk menghitung jumlah SLS tingkat I.

Jika ada SLS tingkat I yang terdiri dari beberapa Blok Sensus (penulisan nama SLSnya berulang), maka isikan kode 0.

Contoh 3:

Pada suatu desa simulasi di RW 02, RT 005 terdiri dari 3 Blok Sensus, yaitu 018B, 019B dan 020P. Sedangkan RT 003 dan RT 004 tergabung menjadi Blok Sensus 021B.



Gambar 5.1. Contoh peta desa simulasi

Cara pengisian Kolom 11 SP2010-RD:

No	Nomor Blok Sensus	Jenis Blok Sensus (B/K/P) ¹⁾	...	SLS Tingkat I (SLS Terkecil)		Tanda SLS (1/0) ⁵⁾
				Kode ⁵⁾		
				Nama	Nama Ketua	
(1)	(2)	(3)	...	(9)	(10)	(11)
15	015	B	...	001		1
16	016	B	...	006		1
17	017	B	...	007		1
18	018	B	...	005		1
19	019	B	...	005		0
20	020	P	...	005		0
21	021	B	...	004		1
	021	B		003		1

Tabel 5.4. Contoh pengisian kolom 11

11. Kolom 12

Kolom 12 digunakan untuk mencatat jumlah muatan masing-masing SLS. Jika satu SLS terbagi kedalam beberapa BS, maka isian muatan SLS cukup dituliskan sekali saja.

12. Kolom 13

Tuliskan kode kondisi Blok Sensus (kode 0, 1 atau 2).

Kode 0, jika di dalam satu Blok Sensus terdapat satu SLS tingkat I (utuh).

Kode 1, jika di dalam satu SLS tingkat I terdapat lebih dari satu Blok Sensus.

Kode 2, jika di dalam satu Blok Sensus terdapat lebih dari satu SLS tingkat I.

Contoh 4:

Lihat Contoh 3 dan Gambar 5.1.

Pengisian kolom 13 SP2010-RD:

No	Nomor Blok Sensus	Jenis Blok Sensus (B/K/P) ¹⁾	...	SLS Tingkat I (SLS Terkecil)		Kondisi BS ⁶⁾
				Nama	Nama Ketua	
(1)	(2)	(3)	...	(9)	(10)	(13)
15	015	B		001		0
16	016	B		006		0
17	017	B		007		0
18	018	B		005		1
19	019	B		005		1
20	020	P		005		1
21	021	B		004		2
	021	B		003		2
22	022	B		002		0

Tabel 5.5. Contoh pengisian kolom 13

13. Kolom 17

Kolom 17 digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan BS atau SLS yang bersangkutan.

Lampiran 1. Contoh pengisian SP2010-RD Blok I dan II



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK



REKAPITULASI DESA PEMETAAN SP2010

Rahasia

SP2010-RD

BLOK I: PENGENALAN TEMPAT		
(1)	(2)	
1. Provinsi : Jawa Tengah	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="3"/>	
2. Kabupaten /Kota *) : Salatiga	<input type="text" value="7"/> <input type="text" value="3"/>	
3. Kecamatan : Argo Mulyo	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>	
4. Desa /Kelurahan*) : Tegal Rejo	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="5"/>	
5. Alamat Kantor Desa /Kelurahan*) : Jl. Magersari No. 6 RT 004 RW 04		
6. Dasar Hukum : PP No. 69 Tahun 1992	<input type="text" value="6"/> **)	
7. Daerah : Perkotaan <input checked="" type="radio"/> 1 Perdesaan <input type="radio"/> 2	<input type="text" value="1"/>	
8. Jumlah SLS Terkecil : 42	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/>	
9. Jumlah Blok Sensus Biasa : 17	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="7"/>	
10. Jumlah Blok Sensus Khusus : 1	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	
11. Jumlah Blok Sensus Persiapan : 0	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	

*) Coret yang tidak perlu

**) Kode Dasar Hukum: 1. Perda Tingkat I
2. Perda Tingkat II
3. SK Menteri

4. SK Gubernur
5. SK Bupati/Walikota
6. Lainnya

BLOK II: KETERANGAN PETUGAS		
URAIAN	PEMETA	PENGAWAS/PEMERIKSA
(1)	(2)	(3)
1. Nama Petugas	Juniarto	Heri Minto
2. Tanggal Pelaksanaan	15-Apr-09	30-Apr-09
3. Tanda tangan

BLOK III : RINCIAN REKAP DESA																
No	Nomor Blok Sensus	Jenis Blok Sensus (B/K/P) ¹⁾	Jumlah Muatan Blok Sensus			Kriteria Muatan Dominan ²⁾	Keberadaan Apartemen dan/atau Kelompaok Bangunan Usaha ³⁾	SLS Tingkat I (SLS Terkecil) <div>Kode⁴⁾ 1</div>		Tanda SLS (1/0) ⁵⁾	Jumlah Muatan SLS	Kondisi BS ⁶⁾	SLS Tingkat II <div>Kode⁴⁾ 2</div>	SLS Tingkat III <div>Kode⁴⁾</div>	SLS Tingkat IV <div>Kode⁴⁾</div>	Keterangan
			Jumlah Keluarga (KK)	Jumlah BSBTT/ BSTT Kosong	Jumlah Kol(4) +Kol(5)			Nama	Nama Ketua				Nama	Nama	Nama	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	001	B	109	3	112	1	4	002	Ahmad Yasin	1	12	2	05			
	001	B						003	Ihsan	1	57		05			
	001	B						004	Nurhadi	1	22		05			
	001	B						005	Agus	1	21		05			
2	002	B	81	6	87	1	4	001	Hendri	1	39	2	08			
	002	B						006	Teja	1	48		08			
3	003	B	91	7	98	1	4	001	Amir	1	34	2	05			
	003	B						006	Kardiman	1	51		05			
	003	B						007	Bambang	1	13		05			
4	004	B	81	3	84	1	4	002	Pujianto	1	52	2	08			
	004	B						004	Joni	1	32		08			
5	005	B	78	2	80	1	4	003	Sarmin	1	24	2	08			
	005	B						005	Girsang	1	56		08			
6	006	B	77	5	82	1	4	001	Tri	1	35	2	06			
	006	B						003	Tantowi	1	47		06			
7	007	B	73	1	74	1	4	002	Sudirja	1	74	0	06			
8	008	B	77	1	78	1	4	001	Herman	1	24	2	07			
	008	B						003	Sukmawan	1	34		07			
	008	B						005	Adi	1	20		07			
JUMLAH HALAMAN INI		<div>B</div> <div>8</div> <div>K</div> <div>-</div> <div>P</div> <div>-</div>	667	28	695					19	695					
JUMLAH HALAMAN SEBELUMNYA		<div>B</div> <div>-</div> <div>K</div> <div>-</div> <div>P</div> <div>-</div>	-	-	-					-	-					
JUMLAH		<div>B</div> <div>8</div> <div>K</div> <div>-</div> <div>P</div> <div>-</div>	667	28	695					19	695					

Keterangan:

1) Kolom (3) Jenis Blok Sensus:

B = Blok Sensus Biasa
K = Blok Sensus Khusus
P = Blok Sensus Persiapan

2) Kolom (7) Kriteria Muatan Dominan:

1. Pemukiman Biasa (termasuk Rumah Susun)
2. Pemukiman Mewah (Kondominium/Apartemen)
3. Pemukiman Kumuh
4. Barak/Asrama/Pondok Pesantren
5. Kawasan Industri
6. Pertokoan/Pasar/Perkantoran (termasuk kampus/sekolah)
7. Hotel/Tempat Rekreasi
8. Persiapan/Kosong (termasuk hutan /Pesawahan)

3) Kolom (8) Keberadaan Apartemen dan/atau Kelompaok Bangunan Usaha

1. Ada Apartemen/kondominium/Flat
2. Ada Pertokoan/Perkantoran
3. Ada Keduanya
4. Tidak Ada

4) Kolom (10);(14);(15); (16) Kode SLS:

1. RT
2. RW
3. Jorong
4. Korong
5. Lingkungan
6. Banjar
7. Dusun
8. Lainnya

5) Kolom (11) Tanda SLS:

1 = Tanda untuk tiap SLS
0 = Tanda untuk SLS yang ditulis berulang

6) Kolom (13) Kondisi BS:

0 = Satu BS terdiri dari satu SLS
1 = Satu SLS terdiri dari beberapa BS
2 = Satu BS terdiri dari beberapa SLS

BLOK III : RINCIAN REKAP DESA																
No	Nomor Blok Sensus	Jenis Blok Sensus (B/K/P) ¹⁾	Jumlah Muatan Blok Sensus			Kriteria Muatan Dominan ²⁾	Keberadaan Apartemen dan/atau Kelompaok Bangunan Usaha ³⁾	SLS Tingkat I (SLS Terkecil) <div>Kode⁴⁾ 1</div>		Tanda SLS (1/0) ⁵⁾	Jumlah Muatan SLS	Kondisi BS ⁶⁾	SLS Tingkat II <div>Kode⁴⁾ 2</div>	SLS Tingkat III <div>Kode⁴⁾ <div></div></div>	SLS Tingkat IV <div>Kode⁴⁾ <div></div></div>	Keterangan
			Jumlah Keluarga (KK)	Jumlah BSBTT/ BSTT Kosong	Jumlah Kol(4) +Kol(5)			Nama	Nama Ketua				Nama	Nama	Nama	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
9	009	B	78	3	81	1	4	002	Syukri	1	31	2	07			
	009	B						004	Iman	1	49		07			
10	010	B	77	4	81	1	4	006	Hadi	1	81	0	07			
11	011	B	108	8	116	1	4	003	Aris	1	37	2	04			
	011	B						004	Hendra	1	43		04			
	011	B						006	tejo	1	36		04			
12	012	B	82	2	84	1	4	001	Umar	1	19	2	04			
	012	B						002	kardi	1	20		04			
	012	B						005	Puji	1	45		04			
13	013	B	95	1	96	1	4	001	Anto	1	68	2	03			
	013	B						003	Oni	1	10		03			
	013	B						004	Amin	1	18		03			
14	014	B	98	2	100	1	4	002	Sutanto	1	96	2	03			
	014	B						005	Catur	1	4		03			
15	015	B	87	2	89	1	4	002	Towi	1	51	2	01			
	015	B						003	Dirja	1	29		01			
	015	B						006	Maman	1	9		01			
16	016	B	85	2	87	1	4	001	Sukmawan	1	27	2	02			
	016	B						002	Adi	1	50		02			
JUMLAH HALAMAN INI		<div>B</div> <div>8</div> <div>K</div> <div>-</div> <div>P</div> <div>-</div>	710	24	734					19	723					
JUMLAH HALAMAN SEBELUMNYA		<div>B</div> <div>8</div> <div>K</div> <div>-</div> <div>P</div> <div>-</div>	667	28	695					19	695					
JUMLAH		<div>B</div> <div>16</div> <div>K</div> <div>-</div> <div>P</div> <div>-</div>	1377	52	1429					38	1418					

Keterangan:

- 1) Kolom (3) Jenis Blok Sensus:

B = Blok Sensus Biasa
K = Blok Sensus Khusus
P = Blok Sensus Persiapan
- 2) Kolom (7) Kriteria Muatan Dominan:

1. Pemukiman Biasa (termasuk Rumah Susun)
2. Pemukiman Mewah (Kondominium/Apartemen)
3. Pemukiman Kumuh
4. Barak/Asrama/Pondok Pesantren
5. Kawasan Industri
6. Pertokoan/Pasar/Perkantoran (termasuk kampus/sekolah)
7. Hotel/Tempat Rekreasi
8. Persiapan/Kosong (termasuk hutan /Pesawahan)
- 3) Kolom (8) Keberadaan Apartemen dan/atau Kelompaok Bangunan Usaha

1. Ada Apartemen/kondominium/Flat
2. Ada Pertokoan/Perkantoran
3. Ada Keduanya
4. Tidak Ada
- 4) Kolom (10);(14);(15); (16) Kode SLS:

1. RT
2. RW
3. Jorong
4. Korong

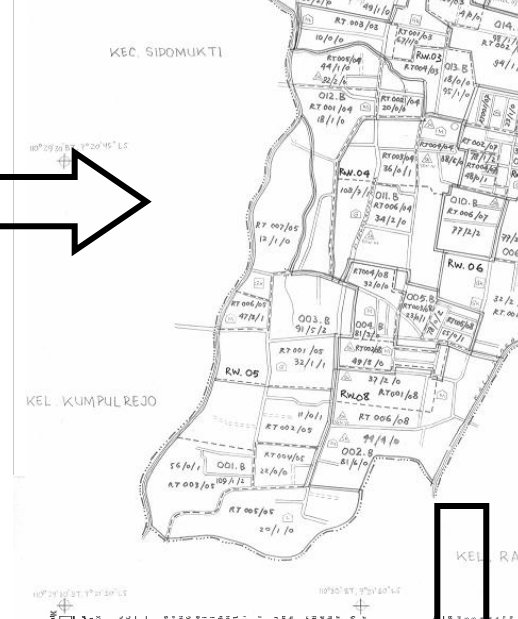
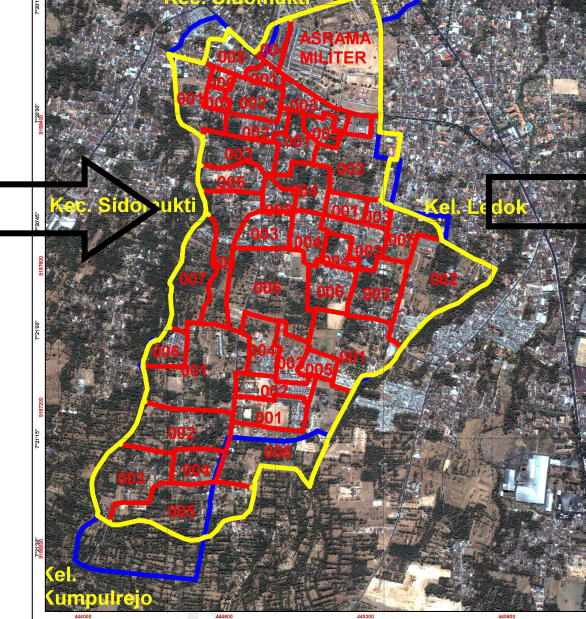
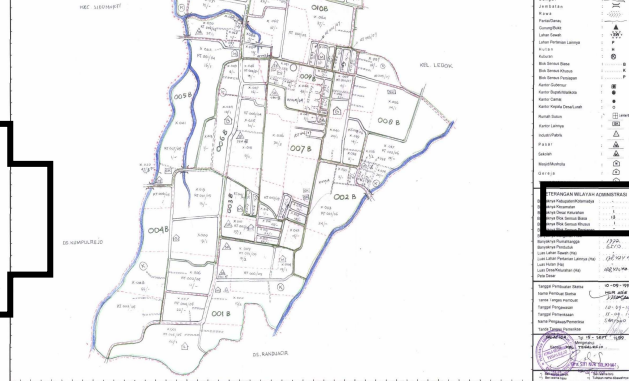
5. Lingkungan
6. Banjar
7. Dusun
8. Lainnya
- 5) Kolom (11) Tanda SLS:

1 = Tanda untuk tiap SLS
0 = Tanda untuk SLS yang ditulis berulang
- 6) Kolom (13) Kondisi BS:

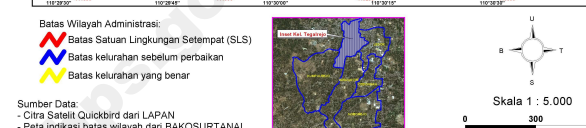
0 = Satu BS terdiri dari satu SLS
1 = Satu SLS terdiri dari beberapa BS
2 = Satu BS terdiri dari beberapa SLS

[illegible]

1) Kolom (3) Jenis Blok Sensus: B = Blok Sensus Biasa K = Blok Sensus Khusus P = Blok Sensus Persiapan	2) Kolom (7) Kriteria Muatan Dominan: 1. Pemukiman Biasa (termasuk Rumah Susun) 2. Pemukiman Mewah (Kondominium/Apartemen) 3. Pemukiman Kumuh 4. Barak/Asrama/Pondok Pesantren 5. Kawasan Industri 6. Pertokoan/Pasar/Perkantoran (termasuk kampus/sekolah) 7. Hotel/Tempat Rekreasi 8. Persiapan/Kosong (termasuk hutan /Pesawahan)	3) Kolom (8) Keberadaan Apartemen dan/atau Kelompaok Bangunan Usaha 1. Ada Apartemen/kondominium/Flat 2. Ada Pertokoan/Perkantoran 3. Ada Keduanya 4. Tidak Ada	4) Kolom (10);(14);(15); (16) Kode SLS: 1. RT 5. Lingkungan 2. RW 6. Banjar 3. Jorong 7. Dusun 4. Korong 8. Lainnya	5) Kolom (11) Tanda SLS: 1 = Tanda untuk tiap SLS 0 = Tanda untuk SLS yang ditulis berulang	6) Kolom (13) Kondisi BS: 0 = Satu BS terdiri dari satu SLS 1 = Satu SLS terdiri dari beberapa BS 2 = Satu BS terdiri dari beberapa SLS
--	---	--	--	--	---



Skala 1 : 5.000



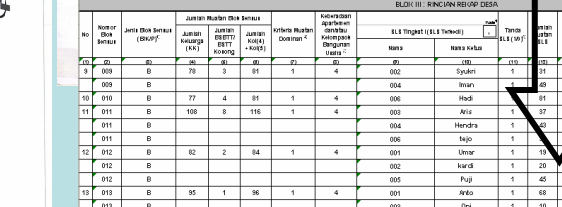
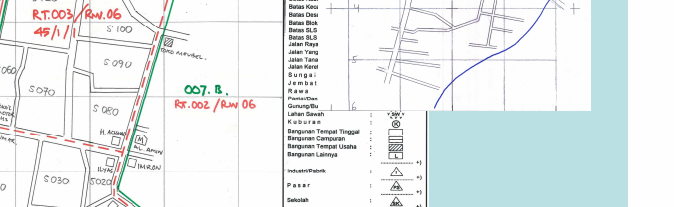
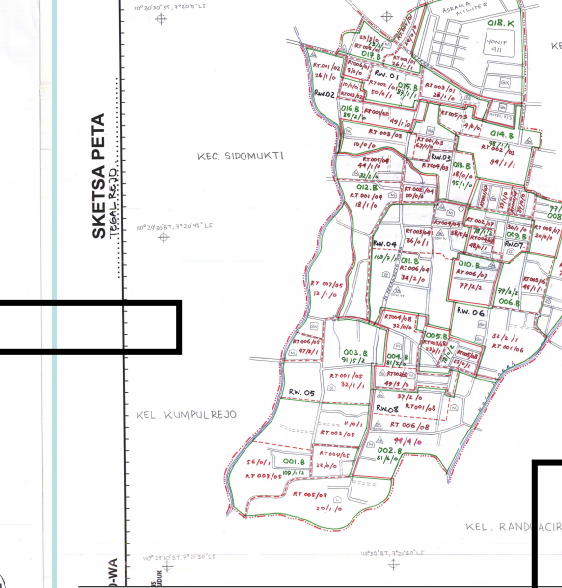
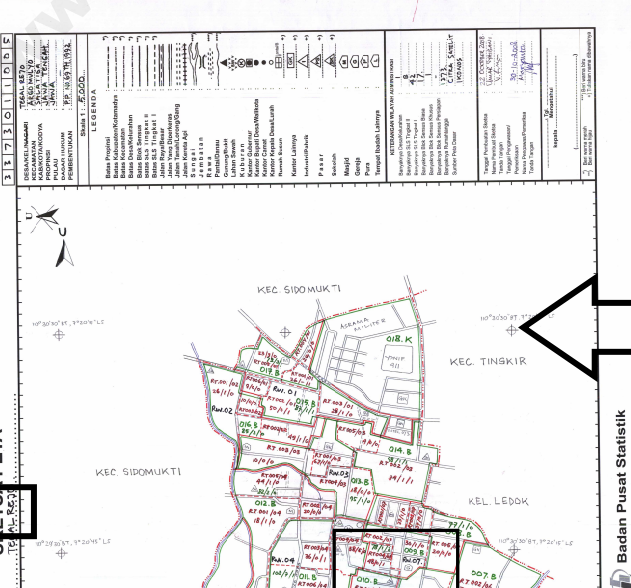
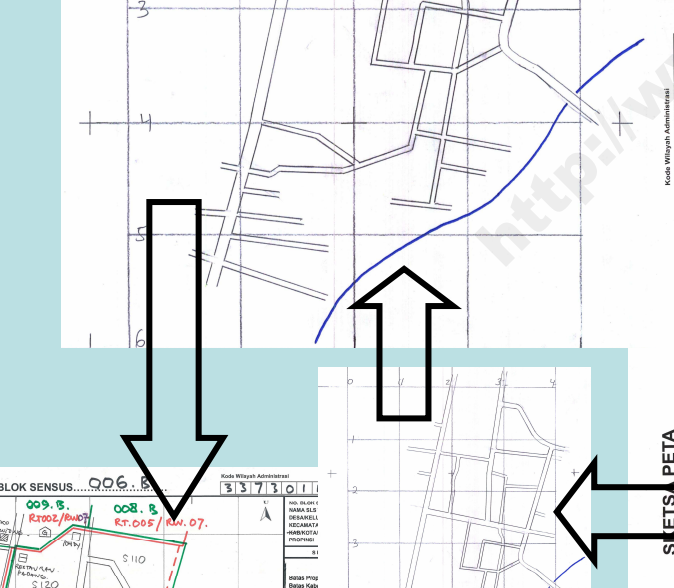
Skala 1 : 5.000

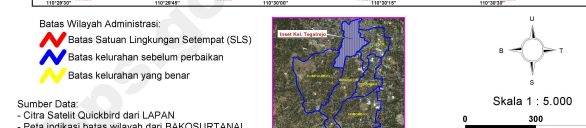
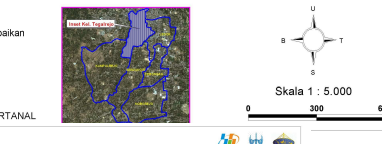
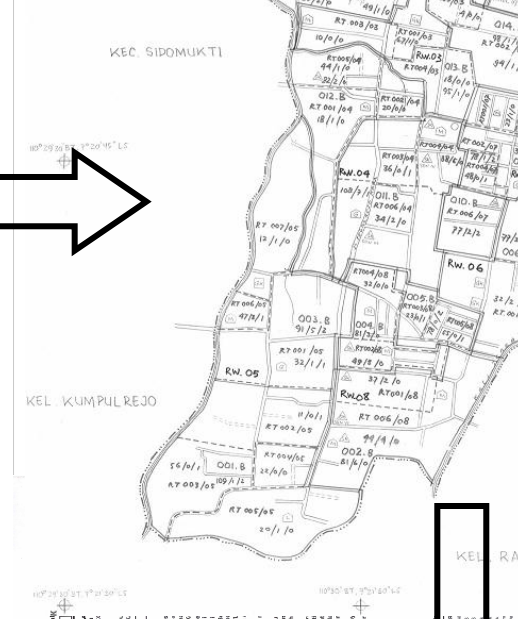
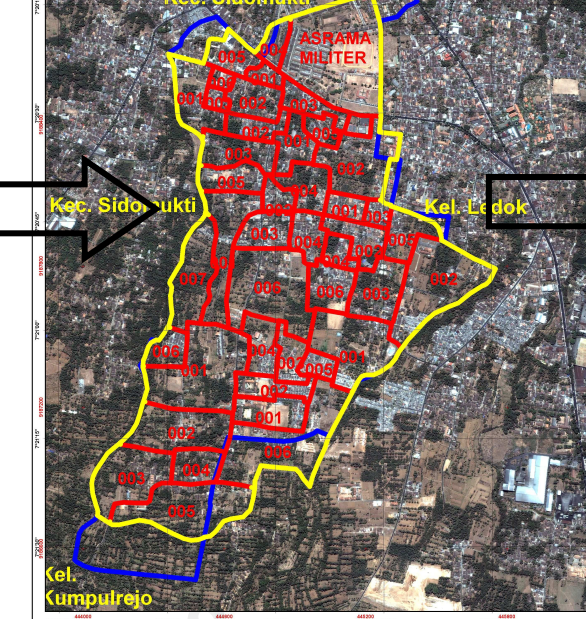
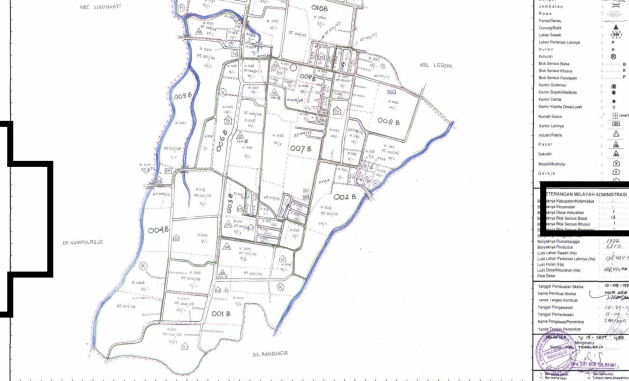
Tegalgerej, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah

- Batas Wilayah Administrasi:
- Batas Satuan Lingkungan Setempat (SLS)
 - Batas kelurahan sebelum perbaikan
 - Batas kelurahan yang benar

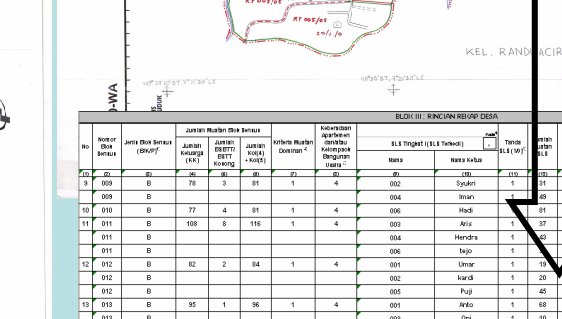
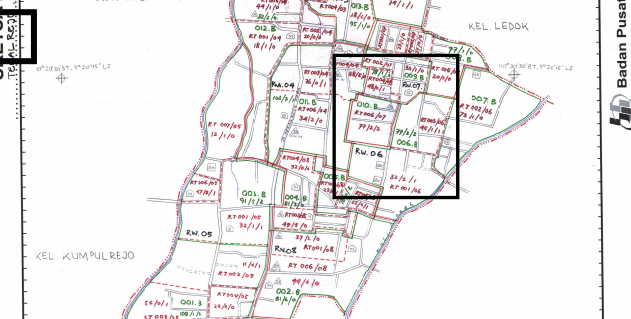
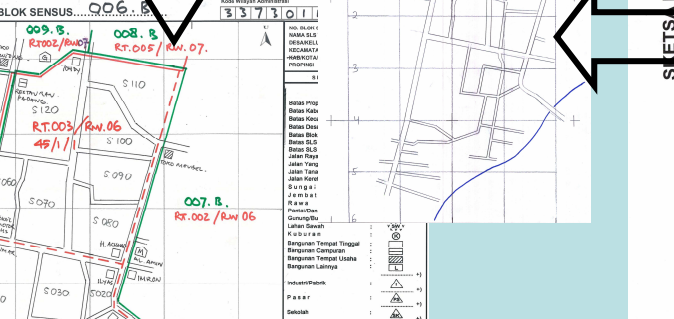
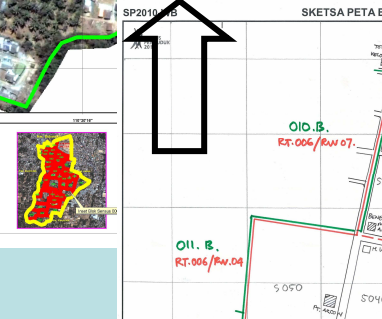
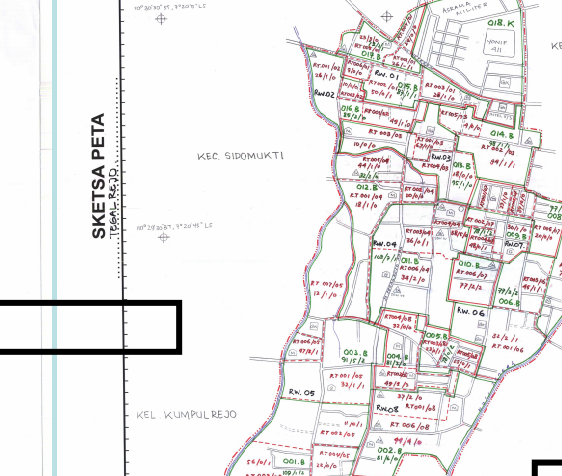
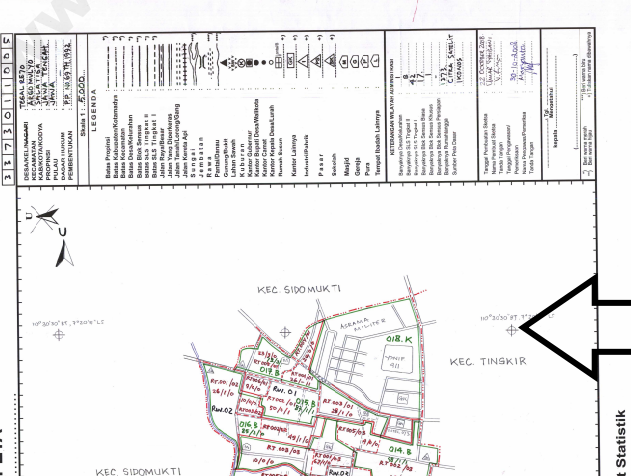
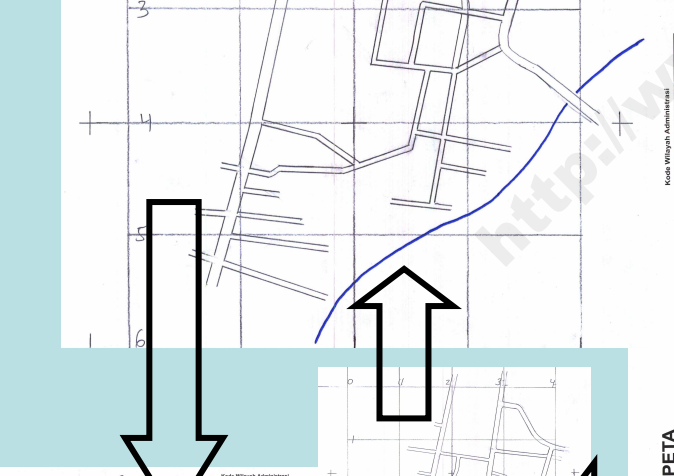
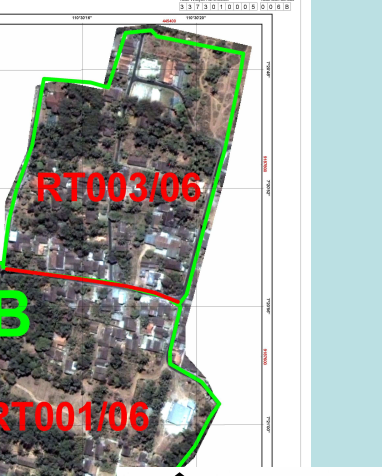
Sumber Data:

- Citra Satelit Quickbird dari LAPAN
- Peta indikasi batas wilayah dari BAKOSURTANAL





Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga,
Provinsi Jawa Tengah



Batas Wilayah Administrasi:
Batas Satuan Lingkungan Setempat (SLS)
Batas kelurahan sebelum perbaikan
Batas kelurahan yang benar

Sumber Data:
- Citra Satelit Quickbird dari LAPAN
- Peta indikasi batas wilayah dari BAKOSURTANAL

SKETSA PETA

Badan Pusat Statistik

BLOK 01: RINCIAN DESA									
No	Kode Blok	Jenis Blok	Jumlah Rumah	Jumlah Penduduk	Jumlah Lahan	Jumlah Lahan	Jumlah Lahan	Jumlah Lahan	Jumlah Lahan
1	001	B	70	3	81	1	4	002	Syukri
2	002	B	77	4	81	1	4	004	Iman
3	003	B	100	5	116	1	4	006	Hasbi
4	004	B	62	2	64	1	4	008	Hasbi
5	005	B	35	1	36	1	4	010	Hasbi

Lampiran 4. Daftar singkatan dan istilah

Daftar Singkatan dan Istilah	
BPS:	Badan Pusat Statistik
BS:	Blok Sensus
BSBTT:	Bangunan Sensus Bukan Tempat Tinggal
BSTTK:	Bangunan Sensus Tempat Tinggal Kosong
cm:	Centimeter
DepKes:	Departemen Kesehatan
KK:	Kepala Keluarga
KSK:	Koordinator Statistik Kecamatan
m:	Meter
PBB:	Pajak Bumi dan Bangunan
RD:	Rekapitulasi Desa
RI:	Republik Indonesia
RT:	Rukun Tetangga
RW:	Rukun Warga
SLS:	Satuan Lingkungan Setempat
SLT.T:	Satuan Lingkungan Setempat Terkecil
SP2010:	Sensus Penduduk Tahun 2010
UU:	Undang-undang
WA:	Wilayah Administrasi
WB:	Wilayah Blok Sensus